



## **RENCANA STRATEGI (RENSTRA)**

**TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya, Kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2021-2026, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Walaupun Ranwal Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami, dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dibidang perkebunan dan peternakan, baik yang ada di tingkat nasional maupun daerah, dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang timbul selama periode pembangunan perkebunan dan peternakan sebelumnya dan memperhitungkan tantangan yang mungkin timbul serta membaca peluang yang ada pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.



Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedepan, namun dengan partisipasi dan peran serta semua pihak yang terkait melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif, maka kami yakin gerak langkah pembangunan perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berjalan sesuai rencana.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Geragai, 10 Januari 2022

Kepala Dinas,

**Drs. AGUS SADIKIN**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196605061985121001



# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I    Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	39
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
<b>BAB III  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	63
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	65
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65 73
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	78



<b>BAB IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	79
<b>BAB V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>Penutup</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b>	Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	40
<b>Tabel 2.2.</b>	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan .....	40
<b>Tabel 2.3.</b>	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan .....	40
<b>Tabel 2.4.</b>	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan dan Staf .....	41
<b>Tabel 2.5.</b>	Sarana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	47
<b>Tabel 2.6.</b>	Pencapaian Kinerja Sub Sektor Perkebunan .....	50
<b>Tabel 2.7.</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sub Sektor Perkebunan .....	51
<b>Tabel 2.8.</b>	Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan .....	53
<b>Tabel 2.9.</b>	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan .....	54
<b>Tabel 2.10.</b>	Perkembangan Produktifitas Komoditi Perkebunan .....	55
<b>Tabel 2.11.</b>	Populasi Ternak di Kab. Tanggung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	56
<b>Tabel 2.13.</b>	Pengobatan Penyakit Pada Ternak .....	57
<b>Tabel 2.14.</b>	Data Realisasi Pelayanan Kesehatan Hewan (Vaksinasi, Pemeriksaan dan Pengobatan Reproduksi).....	58
<b>Tabel 2.15.</b>	Pengobatan Penyakit Pada Ternak .....	50
<b>Tabel 2.16.</b>	Vaksinasi, Pemeriksaan dan Pengobatan .....	51
<b>Tabel 3.2.</b>	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	64
<b>Tabel 3.3</b>	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	72



<b>Tabel 4.1.</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan .....	79
<b>Tabel 5.1.</b>	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	81
<b>Tabel 6.1.</b>	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	82
<b>Tabel 7.1.</b>	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra .....	83

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1.</b>	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD .....	3
<b>Gambar 2.1.</b>	Struktur Organisasi .....	11



## BAB I

# PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada Hakikatnya merupakan Bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga keberhasilan dari Pembangunan Daerah juga merupakan perwujudan dari keberhasilan Pembangunan Nasional. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar, maka daerah dituntut untuk lebih mampu mengelola potensi-potensi ekonomi secara mandiri dan bertanggung jawab, dengan didukung perbaikan kualitas aparatur pemerintahan guna mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan “*Good Governance*”. Pertumbuhan ekonomi serta menurunnya angka kemiskinan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Yang sebelumnya 2 (dua) SKPD yaitu: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Renstra merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang kemudian menghasilkan suatu Renstra instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan



kegagalan dalam pelaksanaannya.

Komponen–komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis–strategis untuk mengimplementasikan sasaran–sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi tantangan satuan kerja yang bersangkutan.

Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berisikan Program Kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan, merupakan turunan/penjabaran dari program prioritas yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Program–program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tercapainya sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pencapaian sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



**Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD**



## 1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 menggunakan sejumlah peraturan sebagai rujukan sebagai berikut:

- A. Peraturan Perundangan yang berlaku
  1. Landasan idiil dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah Pancasila, dan
  2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- B. Landasan operasional meliputi perundang-undangan /peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah dan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);



### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai Pedoman Resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, swasta dan Masyarakat Umum dalam Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, Pembangunan serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026.
2. Menyiapkan Acuan Resmi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar perangkat daerah, antar pemerintah Kabupaten/kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
4. Untuk mempermudah pengukuran dan pengevaluasian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.



## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya tentang Struktur Organisasi diatur melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam Menjalankan Tugas yang telah dibebankan dibantu oleh 1 (Satu) Sekretaris; 4 (Empat) Kepala Bidang; 3 (Tiga) Kepala UPTD; 15 (Lima Belas) Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki fungsi sebagai berikut:

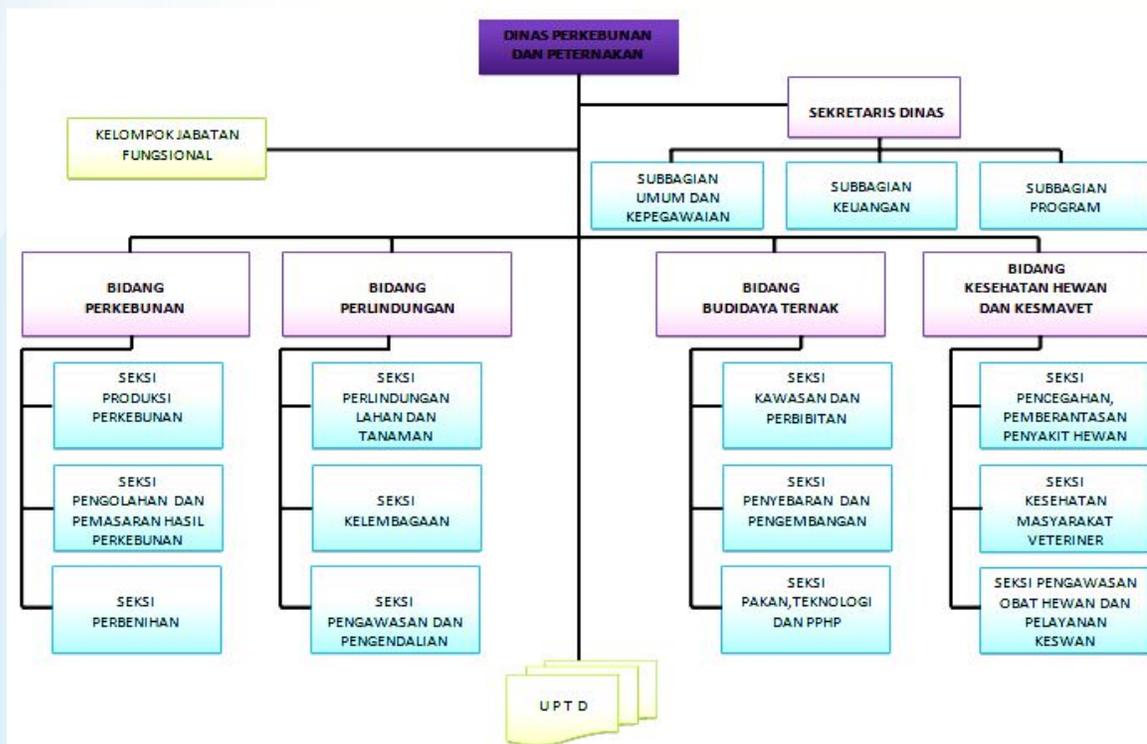
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;
- c. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

Guna memudahkan aparaturnya Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugasnya, maka uraian tugas pokok dan fungsi dijabarkan dalam beberapa bagian, yakni tugas pokok dan fungsi tugas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dalam gambar 2.1 Struktur Organisasi.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi**





## Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perkebunan
  - a. Seksi Produksi Perkebunan
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
  - c. Seksi Perbenihan
4. Bidang Perlindungan
  - a. Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman
  - b. Seksi Kelembagaan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
5. Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan
  - a. Seksi Kawasan dan Perbibitan
  - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan
  - c. Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet
  - a. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - c. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan



Uraian gambar 2.1 struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas

### ✓ Tugas

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan .

### ✓ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan kebijakan Teknis di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
- mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap Sekretariat, Bidang Perkebunan, Bidang Kelembagaan dan Pengelolaan, Bidang Budidaya Ternak dan Bidang Kesehatan Hewan dan Keswawet;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati; dan



- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris Dinas

### ✓ Tugas

memimpin pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan operasional administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan dinas.

### ✓ Fungsi

merumuskan penyusunan rencana dan program kerja, proyek, dan kegiatan lingkup sekretariat.

- mengoordinasikan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan dan program kesekretariatan;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan mengenai urusan kesekretariatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- menyajikan dan mengolah seluruh data dan informasi di bidang kesekretariatan;
- menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas
- menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- mengelola administrasi kepegawaian dinas;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup sekretariat;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan



- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.1 Subbagian Pada Bidang Sekretariat**

### **a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### ✓ Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.

#### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas :

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (SIMPEG);
- melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan



peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian prestasi kerja;

- melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi;
- melaksanakan urusan rumah tangga meliputi tata perjalanan dinas, tugas keprotokolan, hubungan masyarakat, pemeliharaan kebersihan gedung/kantor, keamanan, kendaraan dinas dan peralatan;
- melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **b) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

##### ✓ Tugas

Melakukan penyiapan urusan Keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

##### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas :

- Melakukan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;



- melaksanakan urusan gaji dan tunjangan pegawai;
- melaksanakan kegiatan perbendaraan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
- menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengklasifikasian laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- memeriksa dan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan oleh bendahara;
- menyiapkan data keuangan yang dibutuhkan oleh pihak intern maupun ekstern;
- melakukan penyusunan laporan fisik dan keuangan, laporan fungsional dan administrasi, laporan semester, serta laporan keuangan;
- melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Perkebunan dan Peternakan ;
- menyiapkan data dan informasi pelaporan realisasi pelaksanaan program kegiatan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) satuan kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
- menghimpun, menganalisa data dan informasi permasalahan pelaksanaan program kegiatan serta perumusan pemecahan



masalah pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan ;

- membuat penyajian data umum pada satuan kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### **c) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi**

#### ✓ Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perkebunan dan Peternakan .

#### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- menyusun rencana dan program kerja, proyek dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
- Menyusun rencana program kerja, proyek dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyajian bahan dan data rencana program sektor Pembangunan Perkebunan dan Peternakan;
- melaksanakan penyusunan rencana target penerimaan sektor Pembangunan Peternakan dan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- melaksanakan kegiatan pemetaan mengenai luas wilayah di bidang pengelolaan Perkebunan dan Peternakan;
- menghimpun dan menyiapkan bahan pelaporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;



- menghimpun dan menyajikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala atau laporan tahunan;
- menghimpun bahan laporan pada masing-masing pelaksana program dan kegiatan untuk proses sebagai laporan dinas;
- melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap kebenaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan diatas;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Kepala Bidang Perkebunan**

#### ✓ Tugas

Membantu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perkebunan, pelaksanaan kebijakan produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perbenihan serta memberikan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di Bidang perkebunan yang terintegrasi dengan peternakan.

#### ✓ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan di bidang peningkatan Produksi hasil perkebunan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan serta perbenihan.
- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penyediaan Benih di Bidang Perkebunan.
- Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih di Bidang Perkebunan;
- Pemberian Bimbingan Penerapan Teknologi Peningkatan Produksi di Bidang Perkebunan;



- Pemberian Bimbingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil di Bidang Perkebunan;
- Pemberian Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis (Rekomtek) dalam rangka pemberian Izin Usaha Perkebunan;
- Melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Pembinaan terhadap Usaha Perkebunan;
- Pemberian Rekomendasi Teknis Analisa Mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Bidang Perkebunan;
- Pemantauan dan Evaluasi di Bidang perkebunan;
- Pelaksanaan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air Kawasan perkebunan;
- Pelaksanaan Pengembangan Jalan produksi Kawasan Perkebunan;
- Memfasilitasi Sertifikasi lahan Perkebunan Rakyat;
- Pelaksanaan Pengujian Penerapan Teknologi Anjuran di Bidang perkebunan;
- Rekomendasi kebutuhan pupuk untuk peningkatan produksi perkebunan serta monitoring dan pengawasannya.
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya;

## **2.1) Seksi-Seksi Bidang Perkebunan**

### **a) Kepala Seksi Produksi Perkebunan**

#### **✓ Tugas**

Membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta Pemantauan dan Evaluasi di Bidang produksi Perkebunan.

#### **✓ Fungsi**

Dalam melakukan tugas, Seksi Produksi Perkebunan memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :



- Membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Produksi Perkebunan;
- Melakukan pendataan produksi perkebunan, menganalisa data dan menginventarisir permasalahan serta upaya penyelesaian masalah.
- Melakukan Penyiapan bahan penyusunan rancangan dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Bidang Produksi Perkebunan;
- Melakukan Penyiapan bahan penyusunan rencana Tanam dan Produksi di Bidang Perkebunan;
- Melakukan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Produksi di Bidang Perkebunan;
- Melakukan Bimbingan Penerapan Teknologi Budidaya di Bidang Perkebunan;
- Melakukan Pnyusunan Pelaporan dan Pendokumentasian kegiatan seksi Produksi Perkebunan;
- Merumuskan kebijakan, pembinaan Teknis di Bidang Produksi Perkebunan;
- Memberikan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis (Rekomtek) dalam rangka pemberian Izin Usaha Perkebunan;
- Melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Pembinaan terhadap Usaha Perkebunan;
- Menyiapkan bahan dan rekomendasi Teknis Analisa mengenai Pengendalian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Menyiapkan bahan dan rekomendasi kebutuhan pupuk untuk kebutuhan perkebunan serta membantu monitoring dan pengawasan.
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan Produksi melalui Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air.



- Pengembangan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan Rakyat, Menyiapkan bahan dan memfasilitasi Sertifikasi lahan Perkebunan Rakyat;
- Menyiapkan bahan dan memfasilitasi Sertifikasi lahan Perkebunan Rakyat;
- Merumuskan, membina, mengawasi dan melaksanakan upaya peningkatan produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Perkebunan;
- Melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi serta Rehabilitasi (Peremajaan) terhadap tanaman perkebunan yang tidak Produktif.
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

#### **b) Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

##### ✓ Tugas

Membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta Pemantauan dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan di Bidang Perkebunan.

##### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan Anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- Mendata seluruh unit pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, menganalisa data dan mengidentifikasi masalah serta upaya mengatasi masalah;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Bidang Pengolahan Hasil di Bidang Perkebunan;
- Memberikan rekomendasi tehknis jumlah dan jenis Pabrik Industri pengolahan hasil perkebunan.



- Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit dan kebutuhan alat Pengolahan Hasil di Bidang Perkebunan;
- Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Perkebunan;
- Melakukan pengembangan pemasaran hasil produk Perkebunan di Bidang Perkebunan;
- Menghimpun/menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan serta memberikan alternative pemecahan masalah;
- Meningkatkan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perkebunan;
- Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pembinaan Agribisnis Hasil Pengolahan produk perkebunan;
- Merencanakan, melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan dalam menyelenggarakan Peringatan hari-hari besar Perkebunan, Ekspo, Kursus-kursus, Diklat/Magang/Studi Banding dan lain-lain);
- Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Pelatihan/Diklat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai dengan tugasnya.

### **c) Kepala Seksi Perbenihan**

#### **✓ Tugas**

Membantu Kepala Bidang Perkebunan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta Pemantauan dan Evaluasi Perbenihan di Bidang Perkebunan.

#### **✓ Fungsi**



Dalam melakukan tugas, Seksi Perbenihan memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perbenihan;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan dan anggaran Seksi Perbenihan;
- Menginventarisir kebutuhan benih perkebunan.
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan Kebijakan di Bidang Perbenihan;
- Melakukan penyediaan bantuan benih di bidang Perkebunan;
- Melakukan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang Perkebunan;
- Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi benih tanaman Perkebunan;
- Melakukan pengendalian sumber benih di bidang Perkebunan;
- Melaksanakan pengelolaan kebun bibit entris untuk pengembangan benih perkebunan.
- Melakukan bimbingan dan pembinaan petani untuk penggunaan bibit berkualitas.
- Menginventarisir wilayah produksi unggulan untuk kebutuhan bibit rakyat.
- Membantu melaksanakan pemeriksaan bibit perkebunan untuk kepentingan Pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah kepala Bidang Perkebunan.

#### **4. Kepala Bidang Perlindungan**

##### **✓ Tugas**

Membantu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan, kelembagaan Perkebunan dan Peternakan , pengawasan dan pengendalian dibidang Perkebunan dan



Peternakan serta memberikan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di Bidang perlindungan.

✓ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan lahan dan tanaman, kelembagaan di bidang Perkebunan dan Peternakan , serta pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh usaha dibidang Perkebunan dan Peternakan ;
- Melaksanakan perlindungan berupa pencegahan kebakaran lahan, membantu penanggulangan kebakaran lahan perkebunan serta inventarisasi lahan dan perkebunan yang terkena kebakaran guna upaya rehabilitasi.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perizinan perusahaan di bidang usaha perkebunan dan usaha perkebunan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penanganan hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, serta mengambil langkah-langkah penanganan dalam penendalian hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- Melaksanakan pendataan kelembagaan;
- Melaksanakan pembinaan kelembagaan petani dan petani serta melakukan perlindungan terhadap eksistensi kelembagaan;
- Melaksanakan koordinasi dalam penanganan permasalahan perkebunan;
- Melaksanakan koordinasi dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran dibidang perkebunan;
- Melaksanakan koordinasi perlindungan keberadaan kawasan hidrologis gambut serta penanganan masalahnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kelembagaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas.



### 3.1) Seksi-Seksi Bidang Perlindungan

#### a) Kepala Seksi Perlindungan Lahan Dan Tanaman

✓ Tugas :

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dalam melakukan perlindungan lahan dan tanaman secara teknis serta melakukan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang perlindungan lahan dan tanaman.

✓ Fungsi :

Dalam melakukan tugas, Seksi Perlindungan Lahan dan Tanaman memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Bidang Perlindungan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang perlindungan lahan dan tanaman;
- Melakukan pendataan guna usaha perlindungan lahan dan tanaman perkebunan, menganalisa data dan menginventarisir permasalahan serta upaya penyelesaian masalah.
- Melakukan Penyiapan bahan penyusunan rancangan dan anggaran Seksi perlindungan lahan dan tanaman;
- Melakukan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Bidang perlindungan lahan dan tanaman;
- Melakukan pembinaan dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
- Mempersiapkan personil, peralatan pemadam kebakaran serta pemeliharannya;
- Melaksanakan pemadaman kebakaran lahan dan kebun;
- Melaksanakan pemantauan hotspot;
- Menerima laporan dan melaksanakan langkah-langkah penanganan hama penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;
- Mempersiapkan bahan dan peralatan dalam upaya penanganan hama tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan;



- Mengupayakan langkah-langkah untuk membatasi penyebaran hama tanaman/organisme pengganggu tanaman (OPT);
- Membuat dan menyajikan data kebakaran lahan kawasan perkebunan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah Kepala Bidang Perlindungan.

#### **b) Kepala Seksi Kelembagaan**

##### ✓ Tugas

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan di Bidang Kelembagaan.

##### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Seksi kelembagaan memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di seksi kelembagaan Perkebunan dan Peternakan ;
- Menyusun program dan kegiatan serta anggaran seksi;
- Mendata seluruh kelembagaan Perkebunan dan Peternakan, menganalisa data dan mengidentifikasi masalah serta upaya mengatasi masalah;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di Bidang peningkatan kapasitas kelembagaan Perkebunan dan Peternakan;
- Melakukan pembinaan kelembagaan Perkebunan dan Peternakan;
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan yang diterima oleh organisasi kelembagaan Perkebunan dan Peternakan;
- Membuat rekomendasi teknis skala prioritas organisasi kelembagaan Perkebunan dan Peternakan penerima bantuan;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan terhadap Profesi dan Kelembagaan Pekebun serta menyelenggarakan Pendidikan



dan Pelatihan terhadap pengurus dan anggota Organisasi Kelembagaan Petani Perkebunan;

- Melakukan penguatan kelembagaan pekebun dan petani;
- Memberikan pemahaman terhadap pekebun untuk melakukan Diversifikasi Usaha produk hasil perkebunan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelembagaan di Bidang Perlindungan;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan;
- Menghimpun/menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan Kelembagaan, serta memberikan alternative pemecahan masalah;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintah Kepala Bidang Perlindungan.

### **c) Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian**

#### ✓ Tugas

Membantu Kepala Bidang Perlindungan dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta Pemantauan dan Evaluasi pengawasan dan pengendalian Perkebunan dan Peternakan .

#### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Seksi pengawasan dan pengendalian memiliki uraian Tugas Pekerjaan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di seksi pengawasan dan pengendalian;
- Melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi pengawasan dan pengendalian;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang perizinan usaha Perkebunan dan Peternakan ;
- Meminta laporan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan usaha dibidang Perkebunan dan Peternakan ;



- Mengkoordinasikan adanya pelanggaran dibidang usaha Perkebunan dan Peternakan serta upaya penegakan hukum
- Membuat rekomendasi teknis pencabutan izin usaha Perkebunan dan Peternakan;
- Penyiapan bahan dan rapat evaluasi tehnik pengawasan dan pengendalian.
- Melakukan pendataan dan memfasilitasi/Menginventarisir permasalahan-permasalahan, Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan serta memberikan alternative pemecahan masalah di Bidang Pengawasan dan Perlindungan;
- Mengatur dan mengawasi serta mengkoordinasikan operasional kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian, Kejaksaan dan dengan Instansi terkait;
- Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintah kepala Bidang Perlindungan.

#### **5. Kepala Bidang Budidaya Ternak**

✓ Tugas

Memimpin pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Budidaya ternak.

✓ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, kelompok Bidang Budidaya Ternak menyelenggarakan fungsi :

- merumuskan penyusunan rencana dan program kerja, proyek, dan kegiatan bidang budidaya ternak;
- mengoordinasikan Seksi Usaha, Pengelolaan dan Pemasaran Ternak, Seksi Penyebrangan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Areal;
- mengkoordinasikan pelaksanaan teknis kegiatan dan program pembudidayaan ternak;



- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan pembudidayaan ternak serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- menyelenggarakan penghimpunan dan pengelolaan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan program pembudidayaan ternak;
- menyelenggarakan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembudidayaan ternak;
- merumuskan dan memantau pelaksanaan standar minimal dibidang budi daya ternak;
- memantau pelaksanaan dan penerapan peraturan pemerintah dibidang budi daya ternak;
- mengidentifikasi dan menetapkan daerah budi daya ternak;
- memantau, mengawasi, mengeluarkan, melaporkan populasi dan produksi ternak;
- melaksanakan tehnologi tepat guna dibidang budi daya ternak;
- menyelenggarakan pembinaan umum di bidang peternakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya keterpaduan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan kegiatan dan program pembudidayaan ternak;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup bidang;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.1) Seksi-Seksi Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan**

##### **a) Kepala Seksi Kawasan dan Perbibitan**

###### **✓ Tugas**

merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Kawasan dan Perbibitan.



✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, seksi kawasan dan perbibitan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Kawasan dan pembibitan;
- Menyiapkan bahan penetapan dan penerapan standar bibit dan mengatur sistem pengembangbiakan (sistem breeding) ternak dan hewan lainnya serta pelestarian plasma;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produksi, sertifikasi bibit/benih di wilayah sumber bibit serta meningkatkan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;
- Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan pengawasan peredaran lalulintas bibit/benih ternak dan hewan lainnya;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kelembagaan perbibitan ternak dan hewan lainnya;
- Menyiapkan bahan penetapan sistem dan pola pengembangan peternakan dan kesehatan hewan terpadu dan terintegrasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Menyiapkan bahan penerapan pedoman penetapan lahan dan air serta padang penggembalaan;
- Menyiapkan bahan penetapan peta potensi dan pengawasan pengembangan kawasan peternakan dan hewan lainnya;
- Menyiapkan bahan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **b) Kepala Seksi Penyebaran dan pengembangan**

### ✓ Tugas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan penyebaran dan pengembangan ternak.

### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, seksi Penyebaran dan Pengembangan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- menyusun rencana dan program kerja, proyek, dan kegiatan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- menyusun rancangan teknis dan pengumpulan data bagi pelaksanaan kegiatan dan program penyebaran dan pengembangan ternak;
- melaksanakan penyebaran informasi tentang penyebaran dan pengembangan ternak;
- melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan di bidang penyebaran dan pengembangan ternak serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **c) Kepala Seksi Pakan, Teknologi dan Pengolahan, dan Pemasaran hasil Peternakan (PPHP)**

### ✓ Tugas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan Pakan, Teknologi dan PPHP.

### ✓ Fungsi



Dalam melakukan tugas, seksi Pakan, Teknologi dan Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan (PPHP) memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- menyusun rencana dan program kerja, proyek, dan kegiatan Seksi Pakan, Teknologi dan PPHP;
- menyusun rancangan teknis dan pengumpulan data bagi pelaksanaan kegiatan dan program Pakan, Teknologi serta Pengolahan dan Pemasaran hasil peternakan;
- Menyiapkan bahan penerapan kebijakan dan bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya;
- Menyiapkan bahan pengawasan standar mutu pakan ternak dan hewan lainnya melalui sertifikasi dan labelisasi;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kebijakan, pemantauan, identifikasi, inventarisasi, kebutuhan, pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, rekayasa, pemeliharaan dan pengujian serta penerapan standar mutu dan standar teknis alat dan mesin peternakan dan juga Pengolahan dan Pemasaran hasil peternakan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi serta kerjasama pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan beserta fasilitasi kegiatan pemasaran hasil peternakan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan di bidang Pakan, Teknologi dan PPHP serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;



- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  - melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet

### ✓ Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

### ✓ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program perencanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- menyusun rancangan teknis dan pengumpulan data bagi pelaksanaan kegiatan dan program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan;
- pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- melaksanakan pembinaan terhadap peredaran dan pemakaian obat dan vaksin hewan;



- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya keterpaduan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan kegiatan dan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup bidang;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **5.1) Seksi-Seksi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet**

#### **a) Kepala Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan**

##### **✓ Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

##### **✓ Fungsi**

Dalam melakukan tugas, Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan, memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;
- melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- melakukan surveillans penyakit melalui pengambilan spesimen/sampel;



- Melakukan pemantauan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan ternak dan produk hewan;
- melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **b) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

##### ✓ Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi kesehatan masyarakat veteriner.

##### ✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
- melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;



- melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong/tempat pemotongan hewan dan pemotongan hewan qurban;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan Masyarakat Veteriner;
- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **c) Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan**

#### **✓ Tugas**

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada seksi Pengawasan Obat Hewan Dan Pelayanan Kesehatan Hewan.



✓ Fungsi

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan, memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengawasan Obat Hewan Dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Obat Hewan Dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengawasan Obat Hewan Dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan mengenai Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan, serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Yang memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang perkebunan dan peternakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Perkebunan dan Peternakan, sehingga dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang handal yang dapat melahirkan ide-ide yang berkualitas dan efektif terutama dalam rangka upaya pencapaian Visi Misi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan Visi Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Suatu organisasi/lembaga yang kredibel adalah organisasi/lembaga yang didukung oleh personil yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, dukungan staf untuk membantu menyelesaikan semua program dan kegiatan yang direncanakan serta diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka mensukseskan program kerja. Selanjutnya berbagai background pendidikan yang bervariasi dan beragam akan dapat menambah pemikiran yang positif untuk pencapaian hasil kinerja serta dapat lebih proaktif dalam mengambil kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Sektor Perkebunan dan Peternakan.

### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 118 orang yang terdiri dari PNS, Paramedis Keswan dan PHTT (Pegawai Honor Tidak Tetap). Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:



**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan**

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	35	30
2	Paramedis Keswan	20	17
3	Pegawai Honorer Tidak Tetap (PHTT)	63	53
	Jumlah	118	100

Berdasarkan Tabel 2.2. pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan jumlah pegawai terdiri atas PNS sebanyak 30%, Paramedis Keswan sebanyak 17%, PHTT sebanyak 53%.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	8	23
2	Golongan III	17	49
3	Golongan II	10	28
4	Golongan I	0	0
	Jumlah	35	100

Berdasarkan Tabel 2.2. pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 28%, golongan III sebanyak 49%, dan golongan IV sebanyak 23%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Perkebunan dan Peternakan memerlukan tambahan tenaga Dokter Hewan.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata-2 (S2)	8	23
2	Strata-1 (S1)	13	37
3	Sarjana Muda/D3	4	11
4	SLTA	10	29
	Jumlah	35	100



Berdasarkan Tabel 2.3. Pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pendidikan terdiri atas Strata-2 (S2) sebanyak 23%, Strata-1 (S1) sebanyak 37%, Sarjana Muda/D3 sebanyak 11%, dan SLTA sebanyak 29%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Perkebunan dan Peternakan banyak ditempati oleh Strata-1 (S1) memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada memiliki Kualifikasi Pendidikan yang baik dan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengisian Formasi Jabatan Struktural di Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 27 Jabatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Staf**

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	3
2	Eselon III	5	14
3	Eselon IV	17	49
4	Staf/Pelaksana	12	34
	Jumlah	35	100

Berdasarkan Tabel 2.4. pegawai PNS Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jabatan dan Staf terdiri atas Eselon II sebanyak 3%, Eselon III sebanyak 14%, Eselon IV sebanyak 49% dan Staf/Pelaksana sebanyak 34%. Melihat komposisi tersebut jabatan eselon terisi 23 Jabatan dari 27 Jabatan yang disediakan. Jabatan yang belum terisi yaitu: 1) Kepala UPTD BPT



2) Kasubbag TU UPTD Puskesmas 3) Kassubag TU UPTD Balai  
Produksi Benih Tanaman Perkebunan. 4) Kasi Produksi Perkebunan

**Pegawai Puskesmas Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Nama Pegawai/NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Kecamatan	Jabatan	Pangkat/Gol
1.	Drh. Abdul Roni NIP. 19800317200604 1 007	TanjabTimur, 17 Maret 1980	Muara Sabak Barat	Kepala UPTD Puskesmas	Pembina/IVa
2.	Sabri Andi, A.Md NIP.	Sungai Ular, 01 Agustus 1987	Muara Sabak Timur	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
3.	Ferry Zulfandi,A.Md	Rantau Rasau, 06 Juli 1990	Berbak	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
4.	Muslimin, A.Md NIP.	Mendahara Ilir, 12 Juni 1986	Mendahara	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
5.	Aminah,A.Md NIP.	Jambi, 02 Januari 1986	Sadu	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
6.	Muhammad Huda, A.Md NIP.	Sidomukti, 5 Oktober 1987	Dendang	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
7.	Teguh Sutrisno,A.Md NIP.	Tanjab, 20 Desember 1987	Muara Sabak Barat	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
8.	Febi Putra Perdana, A.Md NIP.	Jambi, 08 Maret 1990	Kuala Jambi	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
9.	Zulkifli,A.Md NIP.	Jambi, 27 Februari 1987	Mendahara Ulu	Penanggung Jawab Puskesmas	PHTT
10.	Musmulyadi NIP. 19750316200701 1025	Nipah Panjang, 16 Maret 1975	Rantau Rasau	Staff Puskesmas	Pengatur II/c
11.	Idhar NIP. 19730818200701 1027	Demak, 18 Agustus 1973	Rantau Rasau	Staff Puskesmas	Pengatur II/c
12.	Bambang AT NIP. 19720608200701 1035	Semarang, 8 Juni 1972	Rantau Rasau	Staff Puskesmas	Pengatur II/c
13.	Aprillia Wati, A.Md NIP.	Rantau Rasau, 16 April 1990	Muara Sabak Timur	Paramedis Puskesmas (Honoror)	PHTT
14.	Ridho Akbar, A.Md NIP.	Padang, 30 Juni 1989	Muara Sabak Timur	Paramedis Puskesmas (Honoror)	PHTT
15.	Al Muammar,A.Md NIP.	Pandan Jaya, 28 Maret 1985	Geragai	Paramedis Puskesmas (Honoror)	PHTT
16.	Budi Aprianto,	Jambi, 2 April 1988	Geragai	Paramedis	PHTT



	A.Md NIP.			Puskesmas (Honorar)	
17.	Rina Apriani,A.Md NIP.	Simpang Pandan, 21 April 1988	Geragai	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
18.	Ade Yuliasman,A.Md NIP.	Padang, 26 Juli 1989	Geragai	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
19.	Revi Aninda,A.Md NIP.	Nipah Panjang, 14 Agustus 1990	Nipah Panjang	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
20.	Mustawa Malarangeng,A.Md NIP.	Kuala Enok, 11 Juni 1989	Nipah Panjang	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
21.	Rudi Salam,A.Md NIP.	Mendahara Ilir, 12 Juni 1986	Mendahara	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
22.	Adi Subari,A.Md NIP.	Tanjab Timur, 7 Februari 1988	Dendang	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
23.	Refki Fatwa Agung, A.Md NIP.	Jambi, 16 September 1989	Dendang	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
24.	Reazy Zulyanti, A.Md NIP.	Pangkal Kemang Rano, 14 Januari 1990	Muara Sabak Barat	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
25.	Ratna Aprianti R, A.Md NIP.	Jembatan Kuning, 6 April 1988	Kuala Jambi	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT
26..	Septian Hadi W, A.Md NIP.	Jambi, 13 September 1989	Mendahara Ulu	Paramedis Puskesmas (Honorar)	PHTT

Untuk Mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Memiliki 11 Satker Puskesmas yang tersebar di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan dibantu 21 Petugas Paramedis

### PETUGAS INSEMINATOR/PKB/ATR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	PETUGAS IB	PETUGAS PKB	PETUGAS ATR
1.	MUARA SABAK BARAT	3	2	1
2.	MUARA SABAK TIMUR	1	1	1
3.	GERAGAI	3	3	2
4.	DENDANG	3	3	1
5.	KUALA JAMBI	1	1	1
6.	NIPAH PANJANG	2	2	1
7.	RANTAU RASAU	5	5	3
8.	MENDAHARA	1	0	0



9.	MENDAHARA ULU	2	2	0
10.	BERBAK	5	5	3
11.	SADU	1	0	0
<b>J U M L A H</b>		<b>27</b>	<b>24</b>	<b>13</b>

Sumber : Data Dari Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan

Petugasnya kadang merangkap 2 atau 3 Kecamatan ini disebabkan karena Peternaknya terkadang tidak mau pindah ke Petugas Baru karena sudah nyaman dengan Petugas Lama.

**DAFTAR NAMA PEGAWAI HARIAN TIDAK TETAP (PHTT)  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Supiono,S.Pdi	Operator Komputer	
2.	Riris Mayang Sari, S.IP	Operator Komputer	
3.	Meliani,SE	Operator Komputer	
4.	Sri Astuti,s.Pt	Operator Komputer	
5.	Nurma Yunita,S.Sos	Operator Komputer	
6.	Rizki Ramadhan,S.Pt	Operator Komputer	
7.	Suri Anita Rahma	Operator Komputer	
8.	Pirdaus, S.Pt	Operator Komputer	
9.	Suprianto	Administrasi Perkantoran	
10.	Juliana Syahputri R	Administrasi Perkantoran	
11.	Adi Santoso	Administrasi Perkantoran	
12.	Ratiun	Administrasi Perkantoran	
13.	Wenny	Administrasi Perkantoran	
14.	Denny Narianda,SH	Administrasi Perkantoran	
15.	Uci Mardilasari	Administrasi Perkantoran	
16.	Meilanni Aditiasuti	Administrasi Perkantoran	
17.	Yuni Pramunika Ningsih	Administrasi Perkantoran	
18.	Indo Ecce,SH	Administrasi Perkantoran	
19.	Windi Yuni Aryanti,S.Pt	Administrasi Perkantoran	



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
20.	Pelita,S.Pt	Administrasi Perkantoran	
21.	Setyawati Utomo,SE	Administrasi Perkantoran	
22.	Irma Astuti Sri Rahayu,S.Pt	Administrasi Perkantoran	
23.	Rabiah Tul Adawiyah,S.Pt	Administrasi Perkantoran	
24.	Martin Julijan, SE	Administrasi Perkantoran	
25.	Muhammad Sukron,S.Pt	Administrasi Perkantoran	
26.	Rolli Satria	Administrasi Perkantoran	
27.	Muhammad Novriansyah,S.IP	Administrasi Perkantoran	
28.	Mardati	Administrasi Perkantoran	
29.	Tamir Barcthon	Petugas Kebersihan Kantor	
30.	Misbah Sulung	Petugas Pemadam Kebakaran	
31.	Mulyadi	Petugas Pemadam Kebakaran	
32.	Rusdianto,SP	Petugas Pemadam Kebakaran	
33.	Indra Bayu	Petugas Pemadam Kebakaran	
34.	Rudi Andian	Petugas Pemadam Kebakaran	
35.	Ramalif Abadi,S.Pt	Petugas Pemadam Kebakaran	
36.	Saifudin	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
37.	Prayitno	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
38.	Safriyanto	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
39.	Kaspul Anuar	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
40.	Yusuf	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
41.	Amat Mujaki	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
42.	Miyem	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
43.	Wirwanto	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
44.	Manisah	Petugas Areal Pembibitan Ternak	
45.	Heriyanto	Petugas Areal Pembibitan Ternak	



<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
46.	Jemangin	Petugas Pengawas Pasar Ternak	
47.	Budi Hartono	Petugas Kebersihan Pasar Ternak	
48.	Eko Purnomo	Petugas Kebersihan Pasar Ternak	
49.	Parto Wiono	Pejaga Kantor Pasar Ternak	
50.	Yohanes Guntur Heru, S.Pt	Petugas Pemeriksian Kebuntingan	
51.	Nursholeh,S.Pt,M.Pt	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
52.	Nurma Irawati,S.Pt	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
53.	Romlan	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
54.	Joko Setiono	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
55.	Sahrul Gunawan	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
56.	Agung Winahyu	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
57.	Wahono	Pekerja Kandang dan Pembuat Pupuk	
58.	Supriyanto	Pekerja Lahan TTP	
59.	Doni Kurniawan	Pekerja Lahan TTP	
60.	Tri Wiyanti,A.Md.Vet	Petugas Kebersihan TTP	
61.	Sukiman	Petugas Keamanan	
62.	drh. Muhammad Irfan	Medik/Dokter Hewan	
63.	Teguh Sutrisno,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
64.	Reasy Zulyanti,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
65.	Jumi Wulan Sari,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
66.	Muhammad Huda, A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
67.	Adi Subari,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
68.	Rina Apriyani,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
69.	Ade Yulyasman,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
70.	Budi Afrianto,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
71.	Al Mu'ammam,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	



NO	NAMA	JABATAN	KET
72.	Muslimin,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
73.	Rudi Salam,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
74.	Zulkifli,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
75.	Muhammad Sulthoni,A,Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
76.	Febby Putra Perdana, A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
77.	Apriliawati,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
78.	Fery Zulfiadi,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
79.	Revi Aninda,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
80.	Mustawa Mallarangeng,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	
81.	Aminah,A.Md	Paramedik Kesehatan Hewan	

#### b. Asset/Modal

Asset/Modal sebagai Sarana Kerja yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bisa terlihat dalam Tabel 2.5. berikut.

**Tabel 2.5. Sarana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan**

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	UPTD Puskesmas di Kec. Ma.Sabak Barat	1	Unit
2	Pasar Ternak di Kec. Geragai	1	Unit
3	UPTD Balai Pembibitan Ternak Kec. Mendahara Ulu	1	Unit
4	UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan di Gontor	1	Unit
5	Satker Puskesmas di 11 Kecamatan	11	Unit
6	Taman Teknologi Pertanian (TPP) Kecamatan Geragai	1	Unit

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 440 Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan Pelantikan atas Jabatan dibawah Ini:

1. Kepala UPTD Puskesmas
  2. Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Perkebunan
  3. Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Pembibitan Ternak
2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dan Berlaku Tanggal 03 Oktober 2018.
3. Nota kesepahaman antara Kepala Balitbang Pertanian Muhammad Syakir dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi Romi Hariyanto di Kantor Balitbang Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta (Senin, 16 Januari 2017) tentang Pembangunan Taman Tekhnologi Pertanian (TTP) Geragai.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.3.1. Keadaan Umum**

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelumnya adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelayanan terpadu menjadi konsep lahir bersamaan dengan era reformasi dimana munculnya kesadaran bahwa praktik pelayanan baik (*good governance*) menjadi sesuatu yang melekat kepada semua lembaga pemerintahan. Dalam sektor Perkebunan dan Peternakan, dua hal yang menjadi sasaran yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Perkebunan dan Peternakan .

Untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak dibentuk menyadari pentingnya peran pendukung yang dikenal dengan nama Tim Teknis. Tim Teknis terdiri dari berbagai anggota yang berasal



dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Keberadaan mereka sangat beralasan karena merupakan pelayanan hewan dan sekaligus ujung tombak di bidang kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

## **2.3.2. Capaian Kinerja**

### **2.3.2.1. Dinas Perkebunan dan Peternakan**

Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dilakukan dengan menggunakan Alat Ukur yang Baku yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Lainnya sebagai berikut:

1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Laporan Keuangan sesuai SAP (Standar Akuntansi Publik)

Secara terperinci penjelasan tentang pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari tabel 2.6 sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Peningkatan Produktivitas Kelapa Dalam (Kg/Ha)	-	1.165	1.167	1.169		1.156		-		99,23		-
2	Peningkatan Produktivitas Pinang (Kg/Ha)	-	486	499	512	-	478		-		98,35		-
3	Peningkatan Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	-	502	510	517	-	543		-		108,17		-
4	Peningkatan Populasi Ternak (Ekor)	4.089.936	4.268.202	4.446.468	4.624.734	4.123.671	4.068.548	4.195.293	-	100	95,32	94,35	-
	a. Sapi	21.032	22.389	23.746	25.103	20.480	21.010	21.204	-	97,38	93,84	89,30	-
	b. Kambing	44.136	46.055	47.974	49.893	42.987	43.941	44.742	-	97,40	95,41	93,26	-
	c. Ayam Buras	3.919.731	4.090.154	4.260.577	4.431.000	3.976.841	3.909.743	4.021.985	-	100	95,59	94,40	-
	d. Ayam Ras	68.338	71.309	74.280	77.251	43.478	47.895	58.590	-	63,62	67,17	78,88	-
	e. Itik	36.699	38.295	39.891	41.487	39.885	45.959	48.772	-	100	100	100	-
5	Peningkatan Produksi Daging												
	a. Ruminansia (Kg)	240.642	251.105	261.568	272.031	223.993,42	248.873	242.481	-	93,08	99,11	92,70	-
	b. Unggas (Kg)	1.436.242	998.901	1.113.774	1.241.858	942.467,15	950.155	961.703	-	65,62	95,12	86,35	-



**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	964.539.500	1.576.168.748	1.838.483.700	1.951.819.000	1.736.047.367	960.471.488	1.562.734.140	1.807.008.268	1.927.321.979	1.729.151.207	99,58%	99,15%	98,29%	98,74%	99,60%	79,99	80,03
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	684.095.000	617.753.500	562.660.000	700.550.000	317.197.000	674.367.900	608.853.700	551.683.144	645.847.300	310.602.000	98,58%	98,56%	98,05%	92,19%	97,92%	53,63	53,94
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.500.000	41.550.000	58.925.000	56.350.000	-	24.500.000	41.550.000	58.668.000	55.684.000	-	100%	100%	99,56%	98,82%	-	130	127,28
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	-	-	16.295.000	1.750.000	20.000.000	-	-	-	1.750.000	100%	-	-	-	100%	91,25	91,25
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	610.838.900	193.100.000	214.904.200	168.286.000	5.808.000	588.673.062	173.520.200	211.062.500	163.519.057	5.808.000	96,37%	89,86%	98,21%	97,17%	100%	99,05	99,01
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	282.545.000	1.116.908.000	1.303.538.000	507.849.000	-	281.974.000	1.111.062.480	1.286.862.000	484.064.000	-	99,80%	99,48%	98,72%	95,32%	-	79,74	71,67
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	360.650.000	315.650.000	292.500.000	259.475.000	324.833.000	358.721.520	312.655.300	288.819.500	257.410.000	322.949.000	99,47%	99,05%	98,74%	99,20%	99,42%	9,93	9,97
8	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Perkebunan	604.470.000	1.708.625.500	1.273.351.300	1.240.340.000	499.973.919,24	601.694.400	1.539.371.301	1.248.301.500	1.225.773.300	498.011.782	99,54%	90,09%	98,03%	98,83%	99,61%	17,29	17,23
9	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan	150.960.100	781.315.200	594.219.800	274.913.000	9.800.000	150.501.100	755.318.743	532.932.527	245.829.700	2.000.000	99,68%	96,67%	89,69%	89,42%	20,41%	93,51	98,67
10	Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	907.528.220	229.550.000	125.000.000	109.500.000	-	890.337.900	222.451.000	124.542.200	108.367.000	-	98,11%	96,91%	99,63%	98,97%	-	87,93	87,83
11	Program Pembinaan Strategi Monitoring dan Evaluasi Pertanian	229.260.400	-	-	-	-	223.307.900	-	-	-	-	97,40%	-	-	-	-	100	100
12	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	-	802.311.500	590.895.000	361.500.000	-	-	769.180.560	565.045.780	318.213.350	-	-	95,87%	95,63%	88,03%	-	54,94	58,63
13	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	279.685.000	215.197.000	168.080.000	-	-	273.904.000	-	161.338.670	-	-	97,93%	0%	95,99%	-	39,90	41,10
14	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	-	259.007.300	107.000.000	160.800.000	137.044.000	-	206.902.500	-	156.421.407	136.073.100	-	79,88%	0%	97,28%	99,29%	47,09	34,23
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	20.000.000	32.000.000	32.000.000	-	-	20.000.000	31.887.000	32.000.000	-	100%	-	99,65%	100%	-	60,00	60,00
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	135.924.312,86	146.250.000	41.225.000	32.690.000	-	135.727.000	146.014.000	-	-	99,85%	-	99,84%	-	-	75,95	7,58



17.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	687.342.000	-	-	-	-	672.881.325	-	-	-	-	97,90%	100	100
	<b>Jumlah</b>	<b>6.916.446.703,37</b>	<b>10.773.049.060,86</b>	<b>7.354.924.000</b>	<b>6.048.982.000</b>	<b>3.752.485.286,24</b>	<b>6.726.432.514</b>	<b>10.371.112.797</b>	<b>7.169.000.111</b>	<b>5.839.299.763</b>	<b>3.711.901.414</b>	<b>97,25%</b>	<b>96,27%</b>	<b>97,47%</b>	<b>96,53%</b>	<b>98,92%</b>	<b>45,75</b>	<b>44,82</b>



### 2.3.2.1. Sektor Perkebunan

Perkembangan luas lahan perkebunan selama periode 2015-2019 berfluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2016 jumlah luas lahan perkebunan hanya seluas 112.743 Ha dan mengalami penambahan luas lahan sampai dengan tahun 2020 menjadi 113.511 Ha terdapat penambahan luas sebesar 768 Ha.

**Tabel 2.8. Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2016-2020**

Komoditi	Luas Lahan (Ha) Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Karet	7.824	7.755	7.768	7.768	7.868
Kelapa Sawit	33.620	33.702	52.475	33.872	33.872
Kelapa Dalam	58.609	58.521	58.505	58.521	58.521
Kelapa Hibrida	69	66	69	69	69
Lada	46	42	44	42	40
Coklat	384	400	419	400	405
Pinang	8.950	9.095	9.250	9.095	9.095
Kopi Robusta	3.232	3.323	3.323	3.323	3.333
Kemiri	9	8	8	8	8
<b>Jumlah</b>	<b>112.743</b>	<b>112.912</b>	<b>131.861</b>	<b>113.098</b>	<b>113.511</b>

\* Angka Sementara Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Perkembangan Luas Tanam untuk komoditi perkebunan selama periode tahun 2016-2020 berfluktuasi. Luas Tanam dari komoditi kelapa sawit pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33.872 Ha dari tahun 2018 sebesar 52.475 Ha, kemudian pertumbuhan luas Tanam komoditi karet pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.868 Ha pada tahun 2020 dari sebelumnya 7.824 Ha pada tahun 2016. Komoditi Kelapa Dalam sedikit mengalami peningkatan Luas Tanam dimana pada tahun 2016 sebesar 58.609 Ha menjadi 58.821 Ha pada tahun 2020. Luas Tanam Kelapa hybrida cenderung stagnan hanya 69 Ha pada tahun 2016 dan tahun 2020. Luas Tanam Lada berfluktuasi cenderung menurun dimana luas tanam Lada pada Tahun 2020 sebesar 40 menurun dari tahun 2016 sebesar 46 Ha. Luas Tanam Kakao mengalami peningkatan pada tahun 2016 luas tanam kakao sebesar 384 Ha meningkat menjadi 405 Ha pada tahun 2020.



Luas Tanam Pinang juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 luas tanam pinang sebesar 8.950 Ha meningkat menjadi 9.095 Ha pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada luas tanam kopi yaitu sebesar 3,232 Ha pada Tahun 2016 menjadi 3.333 Ha pada Tahun 2020. Sama halnya dengan luas tanam kemiri cenderung stagnan pada tahun 2016-2020 sebesar 8 Ha. Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan luas tanam komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2016-2020.

**Tabel 2.9.**  
**Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan**  
**di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020**

Komoditi	Produksi (Ton) Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Karet	3.058	3.647	3.647	3.647	3.692
Kelapa Sawit	45.739	47.806	46.887	47.806	47.806
Kelapa Dalam	51.117	51.398	51.376	51.398	51.398
Kelapa Hibrida	54	54	55	55	55
Lada	9	14	8	14	8
Coklat	173	212	173	212	173
Pinang	2.945	3.207	3.132	3.207	3.207
Kopi Robusta	1.048	1.237	1.237	1.237	1.237
Kemiri	2	4	2	2	2

\* Angka Sementara. Tanjung Jabung Timur Dalam Angka. 2021

Perkembangan Produksi untuk komoditi perkebunan selama periode tahun 2016-2020 berfluktuasi. Produksi dari komoditi kelapa sawit pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 47.806 ton dari tahun 2018 sebesar 45.739 ton, kemudian produksi komoditi karet pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3.692 Ton pada tahun 2020 dari sebelumnya 3.058 ton pada tahun 2016. Komoditi kelapa dalam juga mengalami peningkatan produksi dimana produksi pada tahun 2016 sebesar 51.117 ton menjadi 51.398 ton pada tahun 2020. Produksi kelapa hybrida cenderung stagnan hanya 54 dan 55 ton pada tahun 2016 dan tahun 2020. Produksi Tanaman Lada berfluktuasi cenderung menurun dimana produksi lada pada tahun 2020 sebesar 8 ton menurun dari tahun 2019 sebesar 14 ton. Produksi tanaman coklat cenderung stagnan pada tahun 2016



produksi coklat sebesar 173 ton, dan pada tahun 2020 juga sebesar 173 ton. Produksi tanaman pinang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 produksi tanaman pinang sebesar 2.945 ton meningkat menjadi 3.207 ton pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada produksi tanaman kopi yaitu sebesar 1.048 ton pada tahun 2016 menjadi 1.237 ton pada tahun 2020. Produksi Tanaman Kemiri cenderung stagnan pada tahun 2016-2020 sebesar 2 ton kecuali pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 4 ton. Tabel 2.10 menunjukkan perkembangan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2016-2020.

Jumlah Petani berprofesi bidang perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,29 persen per tahun. Perkembangan jumlah petani pada komoditi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.10.**

**Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2015-2019**

Komoditi	Petani (KK)				
	2015	2016	2017	2018	2019*
Karet	5.266	5.281	5.263	5.283	5.283
Kelapa Sawit	11.357	11.399	11.474	11.474	11.808
Kelapa Dalam	22.821	22.783	22.743	23.054	22.743
Kelapa Hibrida	45	45	45	45	48
Lada	780	754	752	752	762
Coklat	690	692	688	688	688
Pinang	8.409	8.464	8.524	8.524	8.524
Kopi	2.448	2.435	2.426	2.567	2.567
Kemiri	31	31	27	27	27
<b>Jumlah</b>	<b>51.847</b>	<b>51.884</b>	<b>51.942</b>	<b>52.414</b>	<b>52.450</b>

\* Angka Sementara, Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020

### 2.3.2.2. Peternakan

Subsektor Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode tahun 2016-2020 telah memperlihatkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing populasi ternak mengalami



penambahan yang positif, hanya populasi domba, ayam buras dan ayam pedaging yang sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2016 jumlah populasi ternak hanya sebanyak 3.601.785 ekor dan di tahun 2020 jumlah populasi ternak meningkat signifikan menjadi sebanyak 4.368.429 ekor. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak pertahun dalam periode tahun 2016-2020 semuanya menunjukkan angka yang positif. Data Populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11  
Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2016-2020

Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Sapi	18.518	19.244	20.480	21.010	21.204
Kerbau	85	85	82	80	80
Kambing	40.198	41.073	42.987	43.941	44.741
Domba	51	51	51	57	59
Ayam Buras	3.629.402	3.817.768	3.976.841	3.909.743	4.021.985
Itik	33.502	25.457	39.885	45.959	48.772
Ayam Pedaging	22.990	36.131	43.478	47.895	58.590
Ayam Petelur	172.831	172.831	172.239	172.619	172.998
<b>Jumlah</b>	<b>3.601.785</b>	<b>3.917.577</b>	<b>4.112.640</b>	<b>4.296.043</b>	<b>4.368.429</b>

*Sumber Data : \* Angka Sementara LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur*

Jumlah populasi ternak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan baik dari bantuan pemerintah, Hasil Inseminasi Buatan (IB) dan perkawinan alami. Dalam Pelaksanaan Inseminasi Buatan selama Periode Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan Jika pada tahun 2017 Jumlah Inseminasi Buatan hanya sebesar 2.610 ekor dengan angka kelahiran 518 ekor, di tahun 2021 mengalami penambahan yang signifikan menjadi sebanyak 2.882 ekor dengan angka kelahiran 1.386 ekor. Secara terperinci dapat dilihat Realisasi pada tabel 2.14. dibawah ini :



**Tabel 2.12**  
**Inseminasi Buatan (IB)**

Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
Inseminasi Buatan (Dosis)	2.610	2.807	3.258	3.862	2.882
Akseptor (Ekor)	2.327	2.294	2.622	3.005	2.362
Kelahiran (Ekor)	518	1.331	1.244	1.819	1.386

Sumber Data : Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan Disbunnak Kab. Tanjung Jabung Timur

Dalam mendukung penurunan tingkat kematian ternak dan perkembangan populasi ternak yang sehat maka dibutuhkan pengobatan ternak, vaksinasi, pemeriksaan reproduksi dan pengobatan reproduksi, selama periode 2017-2021 jenis ternak yang diobati mengalami penurunan. Jika pada tahun 2017 jumlah pengobatan ternak sebesar 9.685 ekor, di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi sebanyak 411 ekor. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.15. dibawah ini :

**Tabel 2.13.**  
**Pengobatan Penyakit Pada Ternak**

Jenis Ternak (Ekor)	Pengobatan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi	4.603	3.288	2.205	2.435	148
Ayam	356	220	210	151	2
Itik	0	160	0	0	0
Kambing	4.297	3.583	2.898	2.644	237
Anjing	300	252	257	273	6
Kerbau	17	11	4	6	1
Kucing	104	234	287	513	17
Kera	0	0	1	0	0
Kelinci	9	7	1	29	0
Burung	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>9.685</b>	<b>7.755</b>	<b>5.877</b>	<b>6.053</b>	<b>411</b>

Sumber Data : Bidang Keswan dan Kesmavet Disbunnak Kab. Tanjung Jabung Timur

Selama periode 2017-2021 jenis ternak yang vaksinasi, desinfeksi, pemeriksaan reproduksi, pengobatan reproduksi dan pemeriksaan sample mengalami penurunan. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel 2.16. dibawah ini :



**Tabel 2.14.**  
**Data Realisasi Pelayanan Kesehatan Hewan**  
**(Vaksinasi, Pemeriksaan dan Pengobatan Reproduksi)**

<b>Kegiatan</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Vaksinasi SE (dosis)	3.237	2.726	1.589	800	0
Vaksinasi Rabies (dosis)	3.243	3.019	2.655	1.439	498
Vaksinasi ND (dosis)	18.178	17.120	17.120	5.000	1.333
Vaksinasi Jembrana	0	1.655	1.705	600	77
Desinfeksi (liter)	283	292	292	40	671
Pemeriksaan Gangguan Reproduksi (ekor)	0	22	72	73	65
Pengobatan Gangguan Reproduksi (ekor)	0	22	72	73	65
Pengobatan Ternak (ekor)	9.685	7.755	5.877	6.053	5.060

*Sumber Data : Bidang Keswan dan Kesmavet*

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Hasil analisis terhadap Renstra SKPD Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka terdapat implikasi beberapa tantangan dan peluang dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal.

Tantangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengembangan pelayanan, yaitu :

- a) Nilai Beli TBS yang masih rendah
- b) Tanaman perkebunan masih dijumpai instruksi air laut yang mengakibatkan tanaman sangat terganggu pertumbuhannya dan produksinya;
- c) Masih adanya terjadi kebakaran lahan dan kebun pada musim kemarau yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan adanya hama penyakit perkebunan di kebun masyarakat yang mengakibatkan kerugian fisik;



- d) Masih terjadinya wabah penyakit ternak menular di lingkungan peternak dan masyarakat;
- e) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai; dan
- f) Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan;

Peluang Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengembangan pelayanan, yaitu:

- a) Permintaan terhadap produk hasil perkebunan dan peternakan baik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wilayah-wilayah lain;
- b) Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup potensial untuk pengembangan komoditi perkebunan dan komoditas peternakan;
- c) Peran serta dunia usaha baik yang langsung berhubungan dengan sektor perkebunan dan peternakan maupun secara tidak langsung; dan
- d) Adanya dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah sektor perkebunan dan peternakan.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal identifikasi analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sehingga didapat faktor-faktor kunci dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dihadapi berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa 5 (lima) tahun mendatang.

#### a. Analisis Lingkungan Internal

##### ● Kekuatan (strengths)

- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Keputusan pemberian dan kewenangan dalam perumusan Kebijakan teknis operasional dalam bidang Pertanian sektor Perkebunan dan Peternakan;
- Bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dibidang Perkebunan dan Peternakan; dan



- Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
- **Kelemahan (Weaknesses)**
  - Belum tersosialisasi secara jelas keberadaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai instansi yang memberikan pelayanan sektor Perkebunan dan Peternakan;
  - Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memadai;
  - Belum adanya kejelasan tentang Standar Operasional Prosedur
  - Keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - Keterbatasan anggaran operasional dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan; dan
  - Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis Perkebunan dan Peternakan;
- b. **Analisis Lingkungan Eksternal**
  - **Peluang (Opportunities)**
    - Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang strategis perekonomian karena merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (SIBAJJO) dan alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I);
    - Adanya dukungan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi;
    - Hasil Perkebunan dan Peternakan sebagai sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan kesejahteraan;
    - Meningkatnya kebutuhan produk-produk olahan Perkebunan dan Peternakan yang berkualitas;
    - Sudah adanya Pabrik Sawit PT. Surya Gemilang Agro Mandiri (SGAM) yang berlokasi di Kelurahan Parit Culum Satu Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di dekat Kampus Gontor 12, merupakan salah satu Pabrik



Pengolahan Minyak mentah kelapa sawit atau CPO yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

● **Ancaman (Threats)**

- Saat ini Perusahaan membeli komoditas perkebunan milik petani setempat dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya dengan harga rata-rata Rp.925 hingga Rp. 950 per Kilogramnya. Harga ini turun drastis dari harga sebelum sawit anjlok, yakni mencapai Rp. 1.500 per Kilogram. Hal ini akibat dampak dari pengaruh turunnya harga minyak mentah (CPO) nasional dan juga minimnya permintaan CPO didalam negeri. Hal ini yang membuat para petani merugi.
- Tanaman perkebunan masih dijumpai instruksi air laut yang mengakibatkan tanaman sangat terganggu pertumbuhannya dan produksinya;
- Masih sering terjadi kebakaran lahan dan kebun pada musim kemarau yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat serta mengalibatkan kerugian fisik;
- Masih seringnya terjadi hama penyakit perkebunan di kebun masyarakat;
- Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya Perkebunan dan Peternakan di tingkat petani;
- Terbatasnya permodalan yang dimiliki petani, yang ditandai dengan skala usaha kepemilikan ternak/kebun yang kurang ekonomis;
- Masih adanya pencemaran lingkungan oleh limbah yang dihasilkan para petani;
- Masih rendahnya kualitas bibit dan mutu produk hasil peternakan dan perkebunan.
- Masih terjadinya wabah penyakit ternak menular di lingkungan petani dan masyarakat;
- Belum memadainya informasi pemetaan potensi Perkebunan dan Peternakan;



- Peran serta perbankan terhadap pengembangan usaha Perkebunan dan Peternakan terhadap petani yang masih rendah;
- Masih lemahnya penegakkan hukum terhadap Perkebunan dan Peternakan; dan
- Masih lemahnya kelembagaan kelompok petani.

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Gambaran Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026, seperti tabel 3.1 berikut:



**Tabel 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

<b>Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)</b>			
<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>MISI I :</b>			
<b>Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan</b>			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ketersediaan/Kebutuhan Bibit Unggul masih kurang	Bibit Unggul bermutu sangat terbatas dan sulit didapat ditingkat lapangan	Memberdayakan Balai Pembibitan Ternak dan Inseminasi Buatan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kualitas dan kuantitas produksi perkebunan masih rendah	Instruksi air laut dan tanaman tua	Dukungan Kebijakan dan Pogram baik pemerintah daerah maupun pusat
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ketersediaan obat-obat hewan dan vaksin masih terbatas, dan pelayanan kesehatan hewan belum dapat menjangkau pada semua hewan/ternak	Ketersediaan sarana, prasarana dan biaya operasional pelayanan Keswan	Prioritas pada daerah padat populasi ternak dan meningkatnya partisipasi peternak dalam penanganan penyakit ternak dan Pelayanan Kesehatan hewan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kurang tersedianya Bantuan Alat Pemadam Kebakaran Lahan dan Kebun	Keterbatasan Anggaran dalam Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Lahan dan Kebun	Dukungan Kebijakan dan Pogram baik pemerintah daerah maupun pusat



### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Arahan Presiden maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan;

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian **mendukung mewujudkan struktur ekonomi**



**yang produktif, mandiri dan berdaya saing** melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan Indikator:
  - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024)
  - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan Target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th.2024)
  - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan Target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024
  - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024
  - e. Prevalence of Under – nourishment/PoU (Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th.2020) dan 5,0 % (Th. 2024)
  - f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th.2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024)
  - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 Juta ton (Th. 2020 dan 46,8 juta ton (Th. 2024)
  - h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,5 juta ton (Th. 2020) dan 2,9 juta ton (Th. 2024)
  - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th.2020) dan 100% (Th.2024)



- J. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th.2024)
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan Indikator:
- a. Nilai Tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th.2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024)
  - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th.2024)
  - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th.2020) dan 5,0% (Th.2024)
  - d. Pertumbuhan PDB Holtikultura dengan target 5,8% (Th.2020) dan 5,9% (Th.2024)
  - e. NTP dengan target 103 (Th.2020) dan 105 (Th.2024)
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indicator:
- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th.2024)
  - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

**SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja:**

- 1. Peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

**SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:**

- 2. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional



3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak Negara tujuan
- SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indicator kinerja:**
4. Persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
  5. Persentase kasus pelanggaran perkarantina yang diselesaikan
- SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indicator kinerja:**
6. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
  7. Teknologi yang diterapkan oleh pertanian
- SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai dengan Indikator Kinerja:**
8. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
  9. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
- SS6. Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indicator kinerja:**
10. Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
  11. Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis
  12. Persentase tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan Hama dari Penyakit hewan karantina (HPHK)
- SS7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional dengan indicator kinerja:**
13. Persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
  14. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian
- SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dengan indicator kinerja:**
15. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indicator kinerja:**



16. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian

Selaras dengan kedua visi di atas, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sebagai salah satu Eselon I di bawah Kementan merumuskan visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern”.**

Visi Ditjen PKH bermakna:

1. Peternakan Indonesia yang berdaya saing mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berorientasi ekspor. Daya saing subsector peternakan adalah kemampuan subsector peternakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas peternakan.
2. Peternakan Indonesia yang berkelanjutan adalah suatu proses yang terus menerus berbasis sumber daya local untuk penyediaan pangan masyarakat.
3. Kegiatan produksi peternakan dan kesehatan hewan tidak bertentangan dengan aspek agama, adat istiadat dan lingkungan hidup, bergerak lebih dinamis (maju), optimalisasi sumber daya secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang tepat guna (modern).

Upaya Strategis dalam mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dirumuskan melalui misi organisasi yang tidak terlepas dari tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan
3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.



4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern

Tujuan penting dari pembangunan Ditjen PKH selama 2020-2024 mencakup:

1. Tersedianya benih/Bibit Ternak yang berkualitas
2. Tersedianya Pakan berkualitas dan berkelanjutan
3. Meningkatnya kesehatan hewan
4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional
5. Tersedianya Produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
6. Terwujudnya reformasi birokrasi Ditjen PKH

Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Jumlah Bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat)
2. Indeks ketersediaan pakan berkualitas (Indeks)
3. Status kesehatan hewan (%)
4. Jaminan kesehatan masyarakat veteriner (%)
5. Jumlah Produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton)
6. Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif
7. Nilai RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Indeks)

Sasaran Program Tujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak
2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan
3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak
4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan
5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis
6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia
7. Terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
8. Terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas



Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 2019 dan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB) sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 mengakibatkan terhambatnya pergerakan barang dan jasa termasuk produk peternakan. Salah satu dampak yang terlihat signifikan selama pandemi Covid-19, adanya penurunan harga karena over supply, terutama daging ayam ras. Hal ini menyebabkan Ditjen PKH harus mengubah target indikator lever 1 dan diselaraskan dengan Renstra Kementan yang direvisi pada Bulan November Tahun 2020. Indikator Kegiatan Sasaran Program (IKSP) yang berubah antara lain:

- a) Produksi daging yang semula jumlah menjadi peningkatan produksi dengan Satuan %;
- b) Pertumbuhan volume ekspor berubah menjadi pertumbuhan nilai ekspor;
- c) Indeks ketersediaan sarana menjadi tingkat kemanfaatan sarana.

Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementerian Pertanian mendukung kepada tiga Project Major diantaranya:

1. Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
2. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
3. Wilayah Adat Papua; Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.



**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Produksi Daging Ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya tenaga medis dan Paramedis</li> <li>2. Kelembagaan dan SDM Peternak yang masih kurang</li> <li>3. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis</li> <li>4. Kurangnya modal peternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beternak masih secara tradisional (Usaha Sambilan)</li> <li>2. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas</li> <li>3. Minimnya ketersediaan Indukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas tampung untuk ternak masih tinggi</li> <li>2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik</li> </ol>
2.	Meningkatkan Produksi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Petugas Tekhnis Perkebunan yang masih kurang</li> <li>2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan</li> <li>3. Ketersediaan Teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi Industri untuk hasil olahan perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya anggaran yang langsung bersentuhan dengan pekebun</li> <li>2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan</li> <li>3. Pengetahuan SDM Perkebunan dalam Penguasaan Tekhnologi untuk Peningkatan mutu hasil perkebunan</li> <li>4. Minimnya Sarana dan prasarana pendukung Perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Geografis yang sangat memungkinkan untuk perkebunan</li> <li>2. Keterbukaan akses Transportasi darat yang sangat dibutuhkan untuk arus lalu lintas perkebunan</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur yang masih didominasi oleh hasil perkebunan rakyat</li> </ol>



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pada Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 35 pada Ayat (1):

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b meliputi:
  - a. Kawasan Pertanian tanaman pangan;
  - b. Kawasan Holtikultura
  - c. Kawasan Perkebunan; dan
  - d. Kawasan Peternakan.
2. Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pengembangan perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 3.269 (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar terdapat di:
    1. Kecamatan Mendahara;
    2. Kecamatan Muara Sabak Barat
    3. Kecamatan Geragai



4. Kecamatan Dendang
  5. Kecamatan Berbak
  6. Kecamatan Nipah Panjang
  7. Kecamatan Sadu
  8. Kecamatan Rantau Rasau
- b. Pengembangan perkebunan karet dengan luas kurang lebih 7.562 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara Ulu
  2. Kecamatan Muara Sabak Barat
  3. Kecamatan Dendang
  4. Kecamatan Berbak
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Ma.Sabak Timur
  7. Kecamatan Nipah Panjang
  8. Kecamatan Rantau Rasau
- c. Pengembangan perkebunan coklat dengan luas kurang lebih 340 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara Ulu
  2. Kecamatan Muara Sabak Barat
- d. Pengembangan perkebunan pinang dengan luas kurang lebih 8.500 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang
  7. Kecamatan Muara Sabak Timur
  8. Kecamatan Berbak
  9. Kecamatan Nipah Panjang
  10. Kecamatan Sadu dan
  11. Kecamatan Rantau Rasau



- e. Pengembangan Perkebunan Lada dengan luas kurang lebih 114 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Geragai
  2. Kecamatan Dendang
  3. Kecamatan Mendahara Ulu
  4. Kecamatan Rantau Rasau
- f. Pengembangan Perkebunan Kelapa Dalam dengan Luas kurang lebih 58.765 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Muara Sabak Timur
  6. Kecamatan Nipah Panjang
  7. Kecamatan Sadu
  8. Kecamatan Rantau Rasau
- g. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Luas kurang lebih 22.044 Ha terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Geragai
  5. Kecamatan Dendang
  6. Kecamatan Muara Sabak Timur
  7. Kecamatan Berbak
  8. Kecamatan Nipah Panjang
  9. Kecamatan Sadu; dan
  10. Kecamatan Rantau Rasau



(9) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pengembangan Sentra Peternakan Sapi terdapat di:
  1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang
  7. Kecamatan Muara Sabak Timur
  8. Kecamatan Berbak
  9. Kecamatan Nipah Panjang
  10. Kecamatan Sadu
  11. Kecamatan Rantau Rasau
- b. Pengembangan Sentra Peternakan Kambing terdapat di:
  1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang
  7. Kecamatan Muara Sabak Timur
  8. Kecamatan Berbak
  9. Kecamatan Nipah Panjang
  10. Kecamatan Sadu
  11. Kecamatan Rantau Rasau
- c. Pengembangan Sentra Peternakan Domba terdapat di:
  1. Kecamatan Mendahara Ulu
  2. Kecamatan Geragai
  3. Kecamatan Muara Sabak Timur
  4. Kecamatan Berbak
  5. Kecamatan Nipah Panjang



- d. Pengembangan Sentra Peternakan Ayam Buras terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang
  7. Kecamatan Muara Sabak Timur
  8. Kecamatan Berbak
  9. Kecamatan Nipah Panjang
  10. Kecamatan Sadu
  11. Kecamatan Rantau Rasau
- e. Pengembangan Sentra Peternakan Ayam Pedaging dan ayam petelur terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang
  7. Kecamatan Muara Sabak Timur
  8. Kecamatan Berbak
  9. Kecamatan Nipah Panjang
  10. Kecamatan Sadu
  11. Kecamatan Rantau Rasau
- f. Pengembangan sentra peternakan itik terdapat di:
1. Kecamatan Mendahara
  2. Kecamatan Mendahara Ulu
  3. Kecamatan Muara Sabak Barat
  4. Kecamatan Kuala Jambi
  5. Kecamatan Geragai
  6. Kecamatan Dendang



7. Kecamatan Muara Sabak Timur
8. Kecamatan Berbak
9. Kecamatan Nipah Panjang
10. Kecamatan Sadu
11. Kecamatan Rantau Rasau

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengembangan pelayanan, yaitu:

- a. Tingkat inflasi akan meningkatkan berbagai komoditas yang berdampak sektor usaha perkebunan dan peternakan;
- b. Harga produk perkebunan dan peternakan sangat fluktuatif terutama pada waktu-waktu tertentu seperti menghadapi hari-hari besar keagamaan;
- c. Pengaruh global terutama ekonomi sangat mempengaruhi sektor perkebunan dan peternakan baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Masih sering terjadi kebakaran lahan dan kebun pada musim kemarau yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan hama penyakit tanaman perkebunan di kebun masyarakat yang mengakibatkan kerugian fisik; dan
- e. Masih terjadinya wabah penyakit ternak menular di lingkungan peternak dan masyarakat;



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

---

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis** yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2026. Selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk mengukur apakah Sasaran Strategis dapat mengkonfirmasi Tujuan Strategis yang akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2026).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1



**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan			3,34	4,01	4,72	5,46	6,19	7,31
			1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,19	0,40	0,60	0,81	1,02	1,24
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan			0,15	1,53	3,28	4,75	5,17	6,11
			1. Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	3,60	7,36	11,21	15,14	19,15	23,15
3.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan PAD			4,61	5,74	2,31	4,00	4,00	4,00
			1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4	4	4	4	4	4
			2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4	4	4	4	4	4
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik			2,60	2,90	3,20	3,40	3,60	3,80
			1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Poin)	78	85	87	88,3	90	90
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja)(Huruf)	B	B	B	B	B	BB



## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## STRATEGI

Strategi Dinas Perkebunan dan Peternakan berisikan program guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Pembangunan/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan
2. Optimalisasi Pengelolaan Perkebunan
3. Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen
4. Peningkatan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Perkebunan Masyarakat
5. Peningkatan Populasi Ternak Besar dan Kecil
6. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat

## KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya disusun untuk memperlancar pencapaian tujuan. Kebijakan menjadi bagian daripada keputusan manajemen, Kepala Dinas agar seluruh pemangku kepentingan internal dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai bagian dari pada organisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)



2. Peningkatan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, Tanggul dan Jalan Produksi
3. Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)
4. Percepatan Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)
5. Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penertiban STDBP
6. Penyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao
7. Penguatan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan
8. Pemanfaatan Sarana Pembibitan
9. Penyediaan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan
10. Penyediaan Obat-obatan Hama
11. Penyediaan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan
12. Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Besar Masyarakat khususnya Ternak Sapi
13. Fasilitasi Penyediaan Ternak Kambing
14. Penyediaan Ternak Unggas
15. Penyediaan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak
16. Fasilitasi Jasa Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar
17. Pengembangan Balai Pembibitan Ternak
18. Peningkatan Pengawasan Distribusi Ternak
19. Penyediaan obat-obatan

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada LAMPIRAN



**TABEL 5.1  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2021 - 2026**

**Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)**

**Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	1. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
		2. Mengoptimalkan Sarana Pengelolaan Perkebunan	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				Melakukan Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)		Melakukan Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
							Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		2.		3. Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao,	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan			Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		



		4. Meningkatkan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Perkebunan Masyarakat	Menyediakan Obat-obatan Hama	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					
					Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan		Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	1. Peningkatan Populasi Hewan Ternak	1. Meningkatkan Populasi Ternak Besar dan Kecil	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Memfasilitasi Penyediaan Ternak Kambing	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
			Menyediakan Ternak Unggas	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
						Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak		Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatkan Pengawasan Distribusi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
		2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat	Menyediakan Obat-obatan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					



			Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan  2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	1. Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD  2. Meningkatkan Ekstensifikasi Sumber PAD	Mengoptimalkan Retribusi Daerah						
			Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang sah						
4. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Direct Services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (Open Government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik	Meningkatkan Budaya Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### PROGRAM

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan 2021-2026 sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD						
						Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)					
<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)</b>																									
<b>MISI I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan</b>																									
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	3.27.03	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN PRASARANA PERTANIAN	Laju Pertumbuhan PORB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	2,44	3,340		4,010		4,720		5,460		6,190		7,310	7,310	Kadis Bunnak							
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0	0,1900		0,400		0,60		0,81		1,02		1,24		1,24	Kepala Bidang Perkebunan dan Kepala Bidang Perlindungan						
				3.27.03.01	1.1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PEMERAWATAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100	Kepala Bidang Perkebunan				
						Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67	513.632.632	33,33	669.317.325	50	679.569.186	66,67	699.783.110	83,33	726.378.039	100	748.390.431	100	4.037.070.723	Kepala Bidang Perkebunan			
						Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100	Kepala Bidang Perkebunan				
						Mengembangkan cara dan teknologi digital (pertanian presisi)	3.27.03.2.01	1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	26,23	100	283.632.832	100	443.631.525	100	443.631.525	100	443.631.525	100	470.226.454	100	492.238.846	100	2.576.992.707	
						3.27.03.2.01.04	1.1.1. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Ketersediaan Bibit yang disalurkan (batang)	104.820	148.440		148.440		148.440		148.440		148.440		148.440		890.640			
								Jumlah Paket Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan yang disalurkan (Paket)	72	2		2		2		2		2		2		12			
								Pemanfaatan Sarana Pembibitan/Pemeliharaan Kebun Produksi Benih (LUPTD, Penakar Kelapa Dalam dan Pinang) (Ha)	6	0	283.632.832	0	443.631.525	200	443.631.525	200	443.631.525	200	470.226.454	200	492.238.846	800	2.576.992.707		
								Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan (Kali)	16	1		1		1		1		1		1		6			
						3.27.03.2.02	1.2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	36,2	100	229.999.800	100	225.685.800	100	235.937.661	100	256.151.585	100	256.151.585	100	256.151.585	100	1.460.078.016		
						3.27.03.2.02.09	1.2.1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Luas Pengembangan Tada Air Mikro (TAM) (Ha)	264	25	229.999.800	25	225.685.800	25	235.937.661	25	256.151.585	25	256.151.585	25	256.151.585	150	1.460.078.016		
						3.27.06	2. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penunasan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,02	0,16	189.641.800	0,14	277.049.000	0,12	281.292.530	0,10	289.659.633	0,08	300.668.012	0,06	309.779.551	0,06	1.648.090.526	Kepala Bidang Perlindungan	
								Persentase Penunasan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	0,09	2		2		1,8		1,8	1,999998	1,6		1,6					
						3.27.05.2.01	2.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (%)	63,24	100	189.641.800	100	277.049.000	100	281.292.530	100	289.659.633	100	300.668.012	100	309.779.551	100	1.648.090.526		
		3.27.05.2.01.01	2.1.1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Serangan Hama tanaman perkebunan yang dikendalikan (Ha)	25	180,94	34.624.800	158,32	82.960.000	135,70	85.203.530	113,09	93.570.633	90,47	104.579.012	67,85	104.579.012	67,85	505.516.987						
		3.27.05.2.01.03	2.1.2. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Perkebunan (Ha)	101,47	2262	155.017.000	2262	194.089.000	2036	196.089.000	2036	196.089.000	1809	196.089.000	1809	205.200.539	1809	1.142.573.539						



		3.27.07	3.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	0,29	0,29	168.300.000	0,39	257.735.300	0,39	261.683.004	0,49	269.466.818	0,49	279.707.778	0,59	288.184.132	2,64	1.525.077.032	Kepala Bidang Perlindungan	
		3.27.07.2.01	3.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan yang dibina	NA	100	168.300.000	100	257.735.300	100	261.683.004	100	269.466.818	100	279.707.778	100	288.184.132	100	1.525.077.032		
		3.27.07.2.01.02	3.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani Perkebunan yang dibina/kelempok	5	5	168.300.000	5	257.735.300	5	261.683.004	5	269.466.818	5	279.707.778	5	288.184.132	30	1.525.077.032		
2.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	0,34	0,15		1,53		3,28	4,75		5,17		6,11		6,11		Kadis Bunnak		
		3.27.02	4.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan	NA	33,47		46,78		60,08	73,39		86,69		100		100		5.941.330.827	Kepala Bidang Budaya dan Agribisnis Peternakan	
					Persentase Produksi HPT	NA	41,67		50		58,33	66,67		75		83,33		83,33				
		3.27.02.2.01	4.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	NA	100	170.652.400	100	224.458.900	100	224.458.900	100	224.458.900	100	263.574.991	100	224.458.900	100	1.332.062.991		
		3.27.02.2.01.02	4.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Luasan Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ha)	4	5		6		7		8		9					1.332.062.991		
					Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat (ton)	21,65	15	170.652.400	15	224.458.900	15	224.458.900	15	224.458.900	15	263.574.991	15	224.458.900	90	936.951.691		
		3.27.02.2.03	4.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100	120.949.900	100	176.509.900	100	176.509.900	100	176.509.900	100	176.509.900	100	176.509.900	100	1.003.499.400		
		3.27.02.2.03.01	4.2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Dosis Inseminasi Buatan (Dosis)	3.862	3.817		3.860		3.904	3.949		3.996		4.044			23.570			
					Jumlah Peningkatan Kebutuhan Ternak Sapi Hasil B (Ekor)	1.819	1.200	120.949.900	1.200	176.509.900	1.200	176.509.900	1.200	176.509.900	1.200	176.509.900	1.200	176.509.900	7.200	1.003.499.400		
					Jumlah Peningkatan Akseptor B (Ekor)	3.005	2.936		2.969		3.003	3.038		3.074		3.111			18.131			
		3.27.02.2.06	4.3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100	295.169.900	100	282.857.900	100	297.936.441	100	327.667.285	100	327.667.285	100	349.159.425	100	1.880.458.236		
		3.27.02.2.06.05	4.3.1	Pengawasan Produksi Hijauan Pakan Ternak dan HPT, Bahan Pakan	Jumlah produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton)	NA	167	295.169.900	173	282.857.900	179	297.936.441	185	327.667.285	190	327.667.285	195	349.159.425	1.089	1.880.458.236		
		3.27.02.2.06	4.4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	NA	100	172.250.200	100	300.612.000	100	300.612.000	100	300.612.000	100	300.612.000	100	350.612.000	100	1.725.310.200		
		3.27.02.2.06.01	4.4.1	Persediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Persediaan Bibit Ternak (Ekor)	1915	430	172.250.200	500	300.612.000	500	300.612.000	500	300.612.000	500	300.612.000	500	350.612.000	2.930	1.725.310.200		
		3.27.04	5.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0,15		0,13		0,12	0,10		0,09		0,08		0,08		2.486.526.377	Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet	
					Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	NA	40,65	313.679.600	48,78	412.757.073	56,91	419.079.228	65,04	431.544.825	73,17	447.945.484	81,30	461.520.167	81,30			
		3.27.04.2.01	5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	NA	100	224.949.800	100	262.070.273	100	268.392.428	100	280.858.025	100	297.258.684	100	310.833.367	100	1.644.362.577		
		3.27.04.2.01.01	5.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak (Ekor)		32.300	224.949.800	32.461	262.070.273	32.662	268.392.428	32.906	280.858.025	33.192	297.258.684	33.524	310.833.367	197.045	1.644.362.577		



			3.27.04.2.04	5.2	Penerapan dan Pengawasan Pelayanan Tesis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (Persen)	NA	100	88.729.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	842.163.800			
			3.27.04.2.04.02	5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan yang diperiksa (Sampel)	46	100	88.729.800	120	150.686.800	140	150.686.800	160	150.686.800	180	150.686.800	200	150.686.800	900	842.163.800	
Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																						
3.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan					Persentase Peningkatan PAD	0	4,61		5,74		2,31		4		4		4		4	Kadis Bunnak	
		1.	Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelatangan			Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelatangan (%)	NA	4		4		4		4		4		4		4	Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan	
		2.	Peningkatan Hasil Penjualan Hewan			Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)	NA	4		4		4		4		4		4		4	Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan	
Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tabanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis																						
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur					Indeks Pelayanan Publik	NA	2,6		2,9		3,2		3,4		3,6		3,8		3,8	Kadis Bunnak	
		1.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Point)	NA	78		85		87		88,3		90		90		90	Sekretaris	
						Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja) (Point)	NA	74		75		76		77		78		80		80	Sekretaris	
						Laporan Keuangan sesuai SAP	NA	Sesuai		Sesuai	Sekretaris											
			3.27.01.		6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi (Point)	NA	78	6.021.787.959	85	6.650.513.633	87	6.752.378.830	88,3	6.953.229.713	90	7.217.483.948	90	7.436.204.886	90	41.031.598.969	Sekretaris
			3.27.01.2.01		6.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	NA	Persen	41.709.800	100	34.222.400	100	61.087.597	100	35.222.400	100	65.000.000	100	65.000.000	100	302.242.197	
			3.27.01.2.01.01	6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	NA	3	3.350.000	3	3.350.000	3	3.350.000	3	3.350.000	3	5.000.000	3	5.000.000	18	23.400.000	
			3.27.01.2.01.06	6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	NA	3	20.862.300	3	21.912.400	3	38.777.597	4	22.912.400	3	40.000.000	4	40.000.000	20	184.464.697	
			3.27.01.2.01.07	6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang diaksanakan (Bulan)	NA	12	17.497.500	12	8.960.000	12	18.960.000	12	8.960.000	12	20.000.000	12	20.000.000	72	94.377.500	
			3.27.01.2.02	6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	NA	100	5.214.474.281	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	33.682.312.056	
			3.27.01.2.02.01	6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	NA	1	3.789.864.281	1	4.022.847.555	1	4.022.847.555	1	4.022.847.555	1	4.022.847.555	1	4.022.847.555	6	23.904.102.056	
			3.27.01.2.02.03	6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	NA	12	1.524.610.000	12	1.650.920.000	12	1.650.920.000	12	1.650.920.000	12	1.650.920.000	12	1.650.920.000	72	9.779.210.000	
			3.27.01.2.05	6.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	100	20.000.000	100	50.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	600.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			3.27.01.2.06.02	6.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	NA	0	-	120	0	123	75.000.000	125	75.000.000	125	75.000.000	125	75.000.000	618	300.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			2.18.01.2.06.03	6.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Dilat/Pelatihan Formal (Orang)	NA	4	20.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	54	300.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			3.27.01.2.06	6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	NA	100	147.170.578	100	231.455.378	100	231.455.378	100	327.000.000	100	377.000.000	100	361.014.931	100	1.675.096.265	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



3.27.01.2.06.01	6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan (Jenis)	NA	132	7.800.000	132	7.800.000	132	7.800.000	200	15.000.000	200	15.000.000	200	15.000.000	996	68.400.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.06.02	6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor (Tahun)	NA	1	58.764.960	1	68.938.960	1	68.938.960	1	70.000.000	1	100.000.000	1	85.824.931	6	452.467.811	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.06.05	6.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	NA	14	27.137.618	14	27.313.418	14	27.313.418	14	30.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	84	211.764.454	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.06.06	6.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar (Bulan)	NA	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	72	30.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.06.08	6.4.5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu (Bulan)	NA	12	2.490.000	12	5.190.000	12	5.190.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	5.190.000	72	32.060.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.18.01.2.06.09	6.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	NA	12	45.978.000	12	117.213.000	12	117.213.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	880.404.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.07	<b>6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>98.797.300</b>	<b>100</b>	<b>180.982.300</b>	<b>100</b>	<b>180.982.300</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100</b>	<b>365.293.993</b>	<b>100</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.626.055.893</b>	
3.27.01.2.07.02	6.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	NA	1	40.000.000	3	75.930.000	3	75.930.000	3	80.000.000	1	245.293.993	1	480.000.000	12	997.153.993	
3.27.01.2.07.06	6.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	NA	14	58.797.300	28	105.052.300	28	105.052.300	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	160	628.901.900	
3.27.01.2.08	<b>6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>53.800.000</b>	<b>100</b>	<b>56.200.000</b>	<b>100</b>	<b>334.800.000</b>	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								
3.27.01.2.08.01	6.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	NA	1000	5.800.000	700	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	4500	40.800.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.08.02	6.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumbardaya Air, Listrik (Bulan)	NA	12	48.000.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	72	294.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.27.01.2.09	<b>6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>330.836.000</b>	<b>100</b>	<b>408.886.000</b>	<b>100</b>	<b>408.886.000</b>	<b>100</b>	<b>511.039.758</b>	<b>100</b>	<b>530.222.400</b>	<b>100</b>	<b>530.222.400</b>	<b>100</b>	<b>2.720.092.558</b>	
3.27.01.2.09.02	6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Lapangan yang dipelihara (Unit)	NA	59	312.140.000	61	390.190.000	61	390.190.000	61	480.000.000	61	470.222.400	61	470.222.400	61	2.512.964.800	
3.27.01.2.09.06	6.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	NA	14	4.200.000	14	4.200.000	14	4.200.000	14	4.200.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	36.800.000	
3.27.01.2.09.09	6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	NA	2	14.496.000	2	14.496.000	2	14.496.000	2	26.839.758	3	50.000.000	3	50.000.000	14	170.327.758	
3.27.01.2.13	<b>6.8 Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Penataan Organisasi</b>	<b>NA</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>90.000.000</b>	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
3.27.01.2.13.04	6.8.1 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	NA	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					7.966.064.391		9.251.811.031		9.393.520.019		9.672.932.184		10.040.547.437		10.344.819.392		56.669.694.454	



## BAB VII

# ***KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN***

---

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian **VISI dan MISI Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Periode 2021-2026** sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian **tujuan dan sasaran RPJMD**.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026**

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra 2021-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0,00%	0,19	0,40	0,60	0,81	1,02	1,24	1,24
1.	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
2.	Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)(%)	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
3.	Persentase Jalan Produksi (%)	NA	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
4.	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,02	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,06
5.	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	0,09	2	2	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6
6.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,29	0,29	0,39	0,39	0,49	0,49	0,59	2,64
8.	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	0	3,60	7,36	11,21	15,14	19,15	23,15	23,15
7.	Persentase Inseminasi Buatan (%)	20,17	33,47	46,78	60,08	73,39	86,69	100	100
8.	Persentase Produksi HPT (%)	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	83,33	83,33
9.	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0,04	0,15	0,13	0,12	0,1	0,09	0,08	0,08
10.	Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	18,70	40,65	48,78	56,91	65,04	73,17	81,30	81,30



No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	78	78	85	87	88,3	90	90	90
12.	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)	NA	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
13.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)	NA	59,76	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
14.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)	NA	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
15.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)	NA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)	NA	12,4	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
17.	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	NA	0,16	0,14	0,12	0,10	0,08	0,06	0,06
18.	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	NA	2	2	1,8	1,8	1,6	1,6	1,60%
19.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi (%)	NA	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	1,59
20.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing (%)	NA	1,52	1,53	1,56	1,57	1,58	1,59	1,59
21.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras (%)	NA	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	1,59



No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler (%)	NA	1,42	1,60	1,61	1,63	1,64	1,65	1,65
23.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Itik (%)	NA	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59	1,59
24.	Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB) (%)	NA	1,10	1,12	1,15	1,17	1,18	1,20	1,20
25.	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB) (%)	NA	33,47	46,78	60,08	73,39	86,69	100	100
26.	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,08
27.	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	NA	0,91	0,50	0,62	0,75	0,87	1	0,91
28.	Persentase Pemeriksaan Sampel Kesmavet (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100
29.	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (%)	NA	4	4	4	4	4	4	4
30.	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)	NA	4	4	4	4	4	4	4



No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) (Poin)	NA	78	85	87	88,3	90	90	90
32.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja) (Poin)	NA	74	75	76	77	78	80	80
33.	Laporan Keuangan sesuai SAP	NA	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



## BAB VIII

### **PENUTUP**

---

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan Dinas Perkebunan dan Peternakan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perkebunan dan Peternakan harus ditingkatkan. Hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan di masa yang akan datang.



Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan ini.

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 telah melibatkan program dan kegiatan yang terkait pemerintah pusat dan daerah, kepada semua pihak yang telah terlibat dan atau berperan dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih.



## LAMPIRAN

**Tabel 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan			3.34	4.01	4.72	5.46	6.19	7.31
			1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	0.19	0.40	0.60	0.81	1.02	1.24
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan			0.15	1.53	3.28	4.75	5.17	6.11
			1. Peningkatan Populasi Hewan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Hewan Ternak (%)	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59
3.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan PAD			4.61	5.74	2.31	4.00	4.00	4.00
			1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	4	4	4	4	4	4
			2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	4	4	4	4	4	4



**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAHYAT)**

**Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam	1. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	2. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit	2. Mengoptimalkan Pengelolaan Perkebunan	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, tanggul dan Jalan Produksi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Melakukan Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)	Melakukan Updating Usaha Perkebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit)				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
						Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi SPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	3. Peningkatan Produksi Tanaman Kopi		Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	4. Peningkatan Produksi Tanaman Pinang		Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Mengoptimalkan Sarana Pembibitan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

	5. Peningkatan Produksi Tanaman Coklat	3. Penyediaan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao,	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	6. Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman	4. Meningkatkan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Perkebunan Masyarakat	Menyediakan Obat-obatan Hama	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						
	7. Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan				Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan		Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	1. Peningkatan Populasi Ternak Sapi	1. Meningkatkan Populasi Ternak Besar dan Kecil	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar masyarakat khususnya ternak sapi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	2. Peningkatan Populasi Ternak Kambing			Memfasilitasi Penyediaan Ternak Kambing	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					
	3. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras		Menyediakan Ternak Unggas	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	4. Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler					Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak		Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	5. Peningkatan Populasi Ternak Itik		Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan Perlindungan Usaha Peternakan Masyarakat melalui asuransi ternak besar	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	6. Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB)		Meningkatkan Pengawasan Distribusi Ternak	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						

	7. Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB)									
	8. Penurunan Angka Kematian Ternak	2. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat	Menyediakan Obat-obatan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan									
	10. Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet		Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Penyediaan Tempat Pelelangan 2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan	1. Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD 2. Meningkatkan Ekstensifikasi Sumber PAD	Mengoptimalkan Retribusi Daerah Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang sah							
4. Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Direct Services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (Open Government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik	Meningkatkan Budaya Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
							Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		Kinerja	Rp (ribu)
<b>VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)</b>																					
<b>Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan</b>																					
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan					NA	3,34		4,01		4,72		5,46		6,19		7,31		7,31	Kepala Bidang Perkebunan	
	1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	NA	0,19		0,40		0,60		0,81		1,02		1,24		1,24		
	1. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam				Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)	NA	0,017		0,017		0,017		0,017		0,017		0,017		0,017		
	2. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)	NA	59,76		0,013		0,013		0,013		0,013		0,013		0,013	Kepala Bidang Perkebunan	
	3. Peningkatan Produksi Tanaman Kopi				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)	NA	0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08	Kepala Bidang Perkebunan	
	4. Peningkatan Produksi Tanaman Pinang				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)	NA	0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06	Kepala Bidang Perkebunan	
	5. Peningkatan Produksi Tanaman Coklat				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)	NA	12,4		0,42		0,42		0,42		0,42		0,42		0,42	Kepala Bidang Perkebunan	
	6. Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman				Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	NA	0,16		0,14		0,12		0,10		0,08		0,06		0,06	Kepala Bidang Perkebunan	
	7. Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan				Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	NA	2		2		1,8		1,8		1,6		1,6		1,6	Kepala Bidang Perkebunan	
			3.27.03	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100	Kepala Bidang Perkebunan	
					Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67	513,632,632	33,33	669,317,325	50	679,569,186	66,67	699,783,110	83,33	726,378,039	100	748,390,431	100	4,037,070,723	Kepala Bidang Perkebunan
					Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33		50		66,67		83,33		100		100	Kepala Bidang Perkebunan	
			3.27.03.2.01	1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	28,23	100	283,632,832	100	443,631,525	100	443,631,525	100	443,631,525	100	470,226,454	100	492,238,846	100	2,576,992,707	
			3.27.03.2.01.04	1.1.1. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Ketersediaan Bibit yang disalurkan (batang)	104,820	148,440		148,440		148,440		148,440		148,440		148,440		890,640		
					Jumlah Paket Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan yang disalurkan (Paket)	72	2	283,632,832	2	443,631,525	2	443,631,525	2	443,631,525	2	470,226,454	2	492,238,846	2	2,576,992,707	
					Pemanfaatan Sarana Pembibitan/Pemeliharaan Kebun Produksi Benih (LUPID, Penangkar Kelapa Dalam dan Pinang) (Ha)	6	0		0	200	443,631,525	200	443,631,525	200	470,226,454	200	492,238,846	200	800		
					Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan (Kali)	16	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	24	
			3.27.03.2.01.0017	1.1.1. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)					1		1		1		1		4	1,849,728,350		
			3.27.03.2.02	1.2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	35,2	100	229,999,800	100	225,685,800	100	235,937,661	100	256,151,585	100	256,151,585	100	256,151,585	100	1,460,078,016	



		8. Penurunan Angka Kematian Ternak			Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0.15		0.13		0.12		0.10		0.09		0.08		0.08		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
		9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan			Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	NA	0.91		0.50		0.62		0.75		0.87		1		0.91		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
		10. Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kesmavet			Persentase Pemeriksaan Sampel Kesmavet (%)	NA	100		100		100		100		100		100		100		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
		3.27.02	4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Inseminasi Buatan	NA	33.47		46.78		60.08		73.39		86.60		100		100		Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan
					Persentase Produksi HPT	NA	41.67		50		58.33		66.67		75		83.33		83.33		
		3.27.02.2.01	4.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	NA	100		100		100		100		100		100		100		
		3.27.02.2.01.02	4.1.1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Luasan Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ha)	4	5		6		7		8		9		10		10		
					Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat (ton)	21,65	15		15		15		15		15		15		15		
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)						13		13		13		13		13		52
		3.27.02.2.03	4.2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100		100		100		100		100		100		100		1.003,499,400
		3.27.02.2.03.01	4.2.1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Dosis Inseminasi Buatan (Dosis)	3,862	3,817		3,860		3,904		3,949		3,996		4,044		23,570		
					Jumlah Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB (Ekor)	1,819	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		7,200		1.003,499,400
					Jumlah Peningkatan Akseptor IB (Ekor)	3,005	2,936		2,969		3,003		3,038		3,074		3,111		18,131		
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)						14		14		14		14		56		706,039,600
		3.27.02.2.05	4.3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100		100		100		100		100		100		100		1.880,458,236
		3.27.02.2.05.05	4.3.1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton)	NA	167		173		179		185		190		195		195		1.089
					Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Ton)						179		185		190		195		195		749
		3.27.02.2.06	4.4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	NA	100		100		100		100		100		100		100		1.725,310,200
		3.27.02.2.06.01	4.4.1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (Ekor)	1915	430		500		500		500		500		500		500		2.930
					Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)						500		500		500		500		500		2.000
		3.27.04	5. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0.15		0.13		0.12		0.10		0.09		0.08		0.08		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
					Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	NA	40.65		48.78		56.91		65.04		73.17		81.30		81.30		2.486,526,377

			3.27.04.2.01	5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	NA	100	224,949,800	100	262,070,273	100	268,392,428	100	280,858,025	100	297,258,684	100	310,833,367	100	1,644,362,577		
			3.27.04.2.01.01	5.1.1	Pengendalian dan Penghulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak (Ekor)			32,300	224,949,800	32,461	262,070,273	32,662	32,906		33,192		33,524		197,045	1,644,362,577		
			3.27.04.2.01.008	5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penunasan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)					12		12	268,392,428	280,858,025		297,258,684		310,833,367	48	1,157,342,504		
			3.27.04.2.04	5.2	Penerapan dan Pengawasan Peryaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (Persen)	NA	100	88,729,800	100	150,686,800	100	150,686,800	100	150,686,800	100	150,686,800	100	150,686,800	100	842,163,800		
			3.27.04.2.04.02	5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan yang diperiksa (Sampel)			46	100	88,729,800	120	150,686,800	140	160		180		200		900	842,163,800	
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)						12	150,686,800	12	150,686,800		150,686,800		150,686,800	48	602,747,200		
Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																							
3.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan PAD					NA	4,61			5,74		2,31			4,00		4,00		4,00		Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan	
		1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan					NA	4,00			4,00		4,00			4,00		4,00		4,00			
		2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan					NA	4,00			4,00		4,00			4,00		4,00		4,00		Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis	
Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis																							
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Score)					NA	78			85		87			88,3		90		90		Sekretaris	
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja) (Nilai)					NA	74			75		76			77		78		80		Sekretaris	
		Laporan Keuangan sesuai SAP (Sesuai)					NA	Sesuai			Sesuai		Sesuai			Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sekretaris	
			3.27.01.	6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	NA	78	6,021,787,959	85	6,650,513,633	87	6,752,378,630	88,3	6,953,229,713	90	7,217,483,948	90	7,436,204,886	90	41,031,598,969		Sekretaris
			3.27.01.2.01	6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	NA	Persen	41,709,800	100	34,222,400	100	61,087,597	100	35,222,400	100	65,000,000	100	65,000,000	100	302,242,197		
			3.27.01.2.01.01	6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	NA	3	3,350,000	3	3,350,000	3	3,350,000	3	3,350,000	3	5,000,000	3	5,000,000	18	23,400,000		
			3.27.01.2.01.06	6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	NA	3	20,862,300	3	21,912,400	3	38,777,597	4	22,912,400	3	40,000,000	4	40,000,000	20	184,464,697		
			3.27.01.2.01.07	6.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (Bulan)	NA	12	17,497,500	12	8,960,000	12	18,960,000	12	8,960,000	12	20,000,000	12	20,000,000	72	94,377,500		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	NA				12		12			12		12		48	67,920,000		
			3.27.01.2.02	6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	NA	100	5,314,474,281	100	5,673,767,555	100	5,673,767,555	100	5,673,767,555	100	5,673,767,555	100	5,673,767,555	100	33,683,312,056		
			3.27.01.2.02.01	6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	NA	1	3,789,864,281	1	4,022,847,555	1	4,022,847,555	1	4,022,847,555	1	4,022,847,555	1	4,022,847,555	6	23,904,102,056		

			ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)					32	35			35		35				
				Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	NA	12		12	12	12			12	12	12	12	12	9,779,210,000	
		3.27.01.2.02.03	6.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1,524,610,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	1,650,920,000	48	6,603,680,000
		3.27.01.2.05	6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	100	20,000,000	50,000,000	100	125,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	600,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.05.02	6.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Sis)	NA	0	120	0	123	125	75,000,000	75,000,000	125	75,000,000	125	75,000,000	618	300,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)					1	1	1	1	1	1	1	1	4	300,000,000	
		2.18.01.2.05.09	6.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal (Orang)	NA	4	10	10	10	10	50,000,000	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	54	300,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			20,000,000	50,000,000	10	12	12	12	12	12	12	12	46	230,000,000	
		3.27.01.2.06	6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	NA	100	147,170,578	231,455,378	100	231,455,378	100	327,000,000	100	377,000,000	100	361,014,931	100	1,675,096,265	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3.27.01.2.06.01	6.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jenis)	NA	132	7,800,000	7,800,000	132	200	7,800,000	15,000,000	200	15,000,000	200	15,000,000	996	68,400,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)					1	1	1	1	1	1	1	1	4	52,800,000	
		3.27.01.2.06.02	6.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor (Tahun)	NA	1	58,764,960	68,938,960	1	1	68,938,960	70,000,000	1	100,000,000	1	85,824,931	6	452,467,811	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)					1	1	1	1	1	1	1	1	4	324,763,891	
		3.27.01.2.06.05	6.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	NA	14	27,137,618	27,313,418	14	14	27,313,418	30,000,000	14	50,000,000	14	50,000,000	85	211,764,454	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)					1	1	1	1	1	1	1	1	4	157,313,418	
		3.27.01.2.06.06	6.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar (Bulan)	NA	12	5,000,000	5,000,000	12	12	5,000,000	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	72	30,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)					12	12	12	12	12	12	12	12	48	20,000,000	
		3.27.01.2.06.08	6.4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu (Bulan)	NA	12	2,490,000	5,190,000	12	12	5,190,000	7,000,000	12	7,000,000	12	5,190,000	72	32,060,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)															
		2.18.01.2.06.09	6.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	NA	12	45,978,000	117,213,000	12	12	117,213,000	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	72	880,404,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					12	12	12	12	12	12	12	12	48	717,213,000	

			3.27.01.2.07	6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	NA	100	98,797,300	100	180,982,300	100	180,982,300	100	200,000,000	100	365,293,993	100	600,000,000	100	1,626,055,893		
			3.27.01.2.07.02	6.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	NA	1	40,000,000	3	75,930,000	3	75,930,000	3	80,000,000	1	245,293,993	1	480,000,000	1	997,153,993		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)					3		3		1		1		1	8	881,223,993		
			3.27.01.2.07.06	6.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	NA	14	58,797,300	28	105,052,300	28	105,052,300	30	120,000,000	30	120,000,000	30	120,000,000	30	160	628,901,900	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)					28		30		30		30		120,000,000	30	118	465,052,300	
			3.27.01.2.08	6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	NA	100	53,800,000	100	56,200,000	100	56,200,000	100	56,200,000	100	56,200,000	100	56,200,000	100	334,800,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			3.27.01.2.08.01	6.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai (Lembar)	NA	1000	5,800,000	620	7,000,000	700	7,000,000	700	7,000,000	700	7,000,000	700	7,000,000	700	4420	40,800,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					12		12		12		12		7,000,000	12	48	28,000,000	
			3.27.01.2.08.02	6.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	NA	12	48,000,000	12	49,200,000	12	49,200,000	12	49,200,000	12	49,200,000	12	49,200,000	12	72	294,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)					12		12		12		12		49,200,000	12	48	196,800,000	
			3.27.01.2.09	6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	NA	100	330,836,000	100	408,886,000	100	408,886,000	100	511,039,758	100	530,222,400	100	530,222,400	100	2,720,092,558		
			3.27.01.2.09.02	6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Lapangan yang dipelihara (Unit)	NA	59	312,140,000	61	390,190,000	61	390,190,000	61	480,000,000	61	470,222,400	61	470,222,400	61	61	2,512,964,800	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					61		61		61		61		470,222,400	61	61	1,810,634,800	
			3.27.01.2.09.06	6.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	NA	14	4,200,000	14	4,200,000	14	4,200,000	14	4,200,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	14	36,800,000	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)					14		14		14		14		10,000,000	14	14	28,400,000	
			3.27.01.2.09.09	6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	NA	2	14,496,000	2	14,496,000	2	14,496,000	2	26,839,758	3	50,000,000	3	50,000,000	3	14	170,327,758	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					2		2		2		2		50,000,000	2	8	141,335,758	
			3.27.01.2.13	6.8 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	NA	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	90,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
			3.27.01.2.13.04	6.8.1 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	NA	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	6	90,000,000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)					1		1		1		1		15,000,000	1	4	60,000,000	
								7,966,064,391		9,251,811,031		9,393,520,019		9,672,932,184		10,040,547,437		10,344,819,392			56,669,694,454	

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026**

**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra 2021-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan (%)	NA	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	100
2.	Persentase Ketersediaan Tata Air Mikro (TAM)(%)	NA	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	100
3.	Persentase Jalan Produksi (%)	NA	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100	100
4.	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	0,02	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06
5.	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan	0,09	2	2	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6
6.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0.29	0.29	0.39	0.39	0.49	0.49	0.59	2,64
7.	Persentase Inseminasi Buatan (%)	20,17	33.47	46.78	60.08	73.39	86.69	100	100
8.	Persentase Produksi HPT (%)	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	83,33
9.	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	0.04	0.15	0.13	0.12	0,1	0.09	0.08	0,08
10.	Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	18,70	40.65	48.78	56.91	65.04	73.17	81,30	81,30

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	78	78	85	87	88.3	90	90	90
12.	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)	NA	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017	0.017
13.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)	NA	59.76	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
14.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)	NA	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
15.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)	NA	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0,06
16.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)	NA	12.4	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0,42
17.	Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	NA	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06	0,06
18.	Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	NA	2	2	1.8	1.8	1.6	1.6	1.60%
19.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi (%)	NA	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1,59
20.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing (%)	NA	1.52	1.53	1.56	1.57	1.58	1.59	1,59
21.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Buras (%)	NA	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1,59

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Broiler (%)	NA	1.42	1.60	1.61	1.63	1.64	1.65	1,65
23.	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Itik (%)	NA	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.59
24.	Persentase Peningkatan Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan (IB) (%)	NA	1.10	1.12	1.15	1.17	1.18	1.20	1,20
25.	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (IB) (%)	NA	33.47	46.78	60.08	73.39	86.69	100	100
26.	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0.15	0.13	0.12	0,10	0,09	0,08	0,08
27.	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	NA	0,91	0,50	0,62	0,75	0,87	1	0,91
28.	Persentase Pemeriksaan Sampel Kesmavet (%)	NA	100	100	100	100	100	100	100
29.	Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (%)	NA	4	4	4	4	4	4	4
30.	Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)	NA	4	4	4	4	4	4	4

